

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha
Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Tenggau
Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



OLEH :

Erna Silitonga

NPM : 177110465

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2021

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Swt, karena berkat rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian yang berjudul “ **"Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis"**” Untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan ini dapat diatasi. Untuk itu pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr.H Syafrinaldi SH., MCL Selaku Rektorat Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dalam menimba ilmu pada lembaga Pendidikan yang beliau pimpin
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif., M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mempermudah proses penyusunan skripsi
3. Ibu Lilis Suriani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberi ijin dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini

4. Ibu Made Devi Wedayanti, S.AP., M.SI selaku dosen pembimbing yang dengan sabar membantu dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini
5. Bapak/Ibu dosen pada Program Studi Administrasi Publik yang telah memfasilitasi serta memberikan ilmu pengetahuan.
6. Ketua Pengelola Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Tenganau yang telah bersedia memberikan data dari awal sebagai bahan penelitian ini
7. Kepada Ayahanda James Silitonga dan Ibunda Saripaini ,serta Adik tersayang Pernando dan saudara-saudaraku, terimakasih atas do'a dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.
8. Rekan-rekan Administrasi Publik Angkatan 2017, khususnya Kepada Diah Merliana, Antika Puji Deanti, Nurdiantari, Anggi Berlianti, Reni Fitri Yustanti, serta teman-teman seperjuangan lainnya, terima kasih atas semangat yang telah diberikan kepada Penulis.
9. Kepada Niko Darmawan Nst terimakasih telah mendukung dan memberikan semangat untuk menyelesaikan penelitian ini

Akhir kata hanya ucapan terimakasih yang bisa diberikan oleh penulis. Semoga Allah SWT membalas jasa-jasa pihak yang membantu kelancaran penulisan usulan penelitian ini. Semoga usulan penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah khasah cakrawala pemikiran bagi para pembaca terutama bagi penulis sendiri

Pekanbaru, 22 Juni 2021

Penulis,

Ttd

Erna Silitonga

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
SK. TIM PENGUJI DAN BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
SURAT PERNYATAAN	xiii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	20
1. Tujuan Penelitian	21
2. Kegunaan Penelitian	21
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	22
A. Studi Kepustakaan	22
1. Konsep Administrasi	22
2. Konsep Organisasi	24
3. Konsep Manajemen	29
4. Konsep Manajemen Sumber Daya	30
5. Konsep Kemiskinan	31
6. Konsep Pembangunan	33
7. Konsep Pemberdayaan	34

8. Konsep Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam	37
B. Kerangka Pikir	42
C. Hipotesis.....	43
D. Konsep Operasional	43
E. Operasionalisasi Variabel.....	45
F. Teknik Pengukuran	46
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Tipe Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian.....	49
C. Populasi dan Sampel	50
D. Teknik Penarikan Sampel	52
E. Jenis dan Sumber Data	52
F. Teknik Pengumpulan Data.....	53
G. Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis.....	53
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	54
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian	54
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	55
A. Gambaran Umum Desa Tenganau.....	56
B. Gambaran Umum Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam.....	56
C. Susunan Pengurus Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam	58
D. Struktur Organisasi Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam	59
E. Tupoksi Jabatan Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam	60
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Identitas Responden.....	65
1. Jenis Kelamin Responden.....	65
2. Usia Responden	66
3. Pendidikan Responden	66
B. Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis	67
1. Indikator Penyadaran dan Pembentukan Prilaku.....	68

2. Indikator Transpormasi Kemampuan	72
3. Indikator Tingkat Kemampuan.....	86
4. Rekapitulasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis	89
C. Hambatan-Hambatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.....	92
1. Kurangnya Ketegasan Dan Sanksi Penanganan Tunggakan	93
2. Minimnya Pembinaan, Pendampingan dan Pengawasan dari Kecamatan	94
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Laporan Perguliran Dana Usaha Ekonomi-Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.....	14
I.2	Data Peminjam Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.....	16
I.3	Jenis Usaha Dan Jumlah Anggota Pemanfaat UED-SP Berdasarkan Jenis Pembayaran.....	17
II.1	Operasional Variabel Penelitian	45
III.1	Jumlah Poupasi dan Sampel.....	55
III.2	Jadwal Penelitian	56
IV.1	Daftar Susunan Pengurus Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam	57
V.1	Distribusi Jenis Kelamin Responden	66
V.2	Distribusi Usia Responden.....	67
V.3	Distribusi Pendidikan Responden.....	68
V.4	Distribusi Tanggapan Responden Terhadap Pendanaan	70
V.5	Distribusi Tanggapan Responden Terhadap Pembangunan Sistem.....	73
V.6	Distribusi Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Program.....	77
V.7	Distribusi Tanggapan Responden Terhadap Dipertanggungjawabkan....	80
V.8	Distribusi Tanggapan Responden Terhadap Kompetensi Petugas UED.	83
V.9	Distribusi Tanggapan Responden Terhadap Partisipasi Masyarakat.....	87
V.10	Rekapitulasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Model Kerangka Pikir	41
IV.1 Stuktur Organisasi Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP)	.59



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Untuk Masyarakat Pemanfaat UED-SP	102
2. Wawancara Untuk Pengelola UED-SP	109
3. Tanggapan Responden Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP)	113
4. Surat Keputusan Dekan Fisipol Universitas Islam Riau Tentang Penetapan Dosen Pembimbing	114
5. Surat Permohonan Rekomendasi Riset Dari Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik	115
6. Surat Rekomendasi Riset Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau (DPMPTSP RIAU)	116
7. Surat Rekomendasi Riset Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis (DPMPTSP BENGKALIS).....	117
8. Surat Rekomendasi Riset Dari Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.....	118
9. Surat Rekomendasi Riset Dari BUMDES Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis	119
10. Surat Keterangan Lulus Plagiat	120
11. Dokumentasi Kantor UED-SP Penelitian Tentang Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis	121

**ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
PROGRAM USAHA EKONOMI DESA-SIMPAN PINJAM
(UED-SP) di DESA TENGGANAU KECAMATAN PINNGIR
KABUPATEN BENGKALIS**

Oleh:

Erna Silitonga

177110465

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Dengan indikator yang digunakan meliputi Penyadaran dan Pembentukan Prilaku, Transpormasi Kemampuan, dan Tingkat Kemampuan. Tipe Penelitian ini adalah survey deskriptif kuantitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik daftar kuesioner, wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi dokumentasi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dikategorikan Cukup Baik. Faktor penghambatnya yaitu kurangnya ketegasan dan sanksi penanganan tunggakan, dan minimnya pembinaan, pendampingan dan pengawasan dari kecamatan. Maka dari itu program UED-SP belum memberdayakan masyarakat Desa Tenganau.

Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Penyadaran dan Pembentukan Prilaku, Transpormasi Kemampuan, Tingkat Kemampuan

Analysis Of Community Empowerment Through The Savings And Loan Village Economic Business Program (UED-SP) In Tenganau Village, Pinggir District, Bengkalis Regency

By

Erna Silitonga

177110465

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze community empowerment through the Savings and Loans Village Economic Business Program (UED-SP) in Tenganau Village, Pinggir District, Bengkalis Regency. The indicators used include awareness and behavior formation, ability transformation, and level of ability. This type of research is a quantitative descriptive survey, while the data collection techniques used are primary data collected by using questionnaires, interviews, and secondary data collected using the observation documentation technique. Based on this analysis technique, the researcher can conclude that Community Empowerment through the Savings and Loans Village Economic Business Program (UED-SP) in Tenganau Village, Pinggir District, Bengkalis Regency is categorized as Good Enough. The inhibiting factors are the lack of firmness and sanctions for handling arrears, and the lack of guidance, assistance and supervision from the sub-district. Therefore, the UED-SP program has not empowered the people of Tenganau Village.

Keywords: Community Empowerment, Awareness and Behavior Formation, Ability Transformation, Ability Level

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (1) Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Pasal 1 ayat (2) Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan otonomi daerah. Pasal 1 ayat (6) Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Kemiskinan yang bertolak belakang dengan kekayaan sumberdaya alam Riau khususnya Kabupaten Bengkalis, mengindikasikan bahwa kemiskinan di Riau termasuk di Kabupaten Bengkalis bukan disebabkan oleh kemiskinan alami, tetapi lebih disebabkan oleh kemiskinan structural yang multidimensional. Kondisi ini berakibat pada ketidakmampuan masyarakat Kabupaten Bengkalis dalam memperoleh hak yang paling mendasar dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik.

Akar permasalahannya adalah kebijakan pembangunan yang belum fokus pada masyarakat miskin. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan ini sangat diperlukan suatu proses pemberdayaan, dimana pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung sebagai persyaratannya. Diantaranya adalah faktor Pendidikan, kesehatan, penguasaan akses sumber-sumber kemajuan ekonomi dan faktor sosial budaya.

Maka dari itu pemerintah harus mengadakan program yang bisa mengatasi kemiskinan. Dengan pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) hal ini termasuk dalam peraturan Bupati Bengkalis No 52 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa..

Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan sebagai upaya yang merupakan percepatan penyelesaian rendahnya kesejahteraan masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah. Penanggulangan kemiskinan dengan menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan bagi masyarakat. Program Pemberdayaan Desa (PPD) merupakan perwujudan nyata dari upaya menanggulangi kemiskinan di Provinsi Riau termasuk di Kabupaten Bengkalis. Seluruh proses kegiatan dalam PPD pada hakekatnya memiliki tiga dimensi, yaitu :

1. Memberdayakan masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan kegiatan pembangunan, melaksanakan secara terbuka (transparan) dan penuh tanggung jawab.

2. Memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.
3. Menyediakan Dana Usaha Desa (UED) untuk pinjaman yang murah dan mudah guna pengembangan ekonomi masyarakat desa, implementasinya terdiri dari dua jenis kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan regular perencanaan pembangunan desa melalui sektoral.
 - b. Kegiatan bidang ekonomi mikro melalui Dana Usaha Desa yang dikelola oleh Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam UED-SP (PERBUB Bengkalis No 52 Tahun 2011)

Adapun tujuan Program Pemberdayaan Desa (PPD) di Kabupaten Bengkalis secara khusus yaitu untuk :

1. Mendorong berkembangannya perekonomian masyarakat desa.
2. Meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.
3. Meningkatkan pengembangan usaha dan penerapan tenaga kerja bagi masyarakat desa.
4. Mengurangi ketergantungan masyarakat dari rentenir.
5. Meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan Dana Usaha Desa.
6. Meningkatkan kebiasaan gotong-royong dan gemar menabung secara tertib.

7. Meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa.
8. Memenuhi kebutuhan sarana /prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat desa.

Pemberdayaan secara luas dapat diartikan suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan, perubahan perilaku, dan pengorganisasian masyarakat. Pemberdayaan muncul karena adanya kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak mampu.

Pemberdayaan bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian dari pemerintah. Dengan demikian tujuannya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan ke arah kehidupan yang lebih baik. Pemberdayaan dapat dilaksanakan melalui pengembangan masyarakat, pengorganisasian masyarakat, apa yang dikembangkan dari masyarakat potensi atau kemampuan dan sikap hidupnya kemampuan antara lain kemampuan untuk bertani, berternak, melakukan wirausaha dan keterampilan home industry

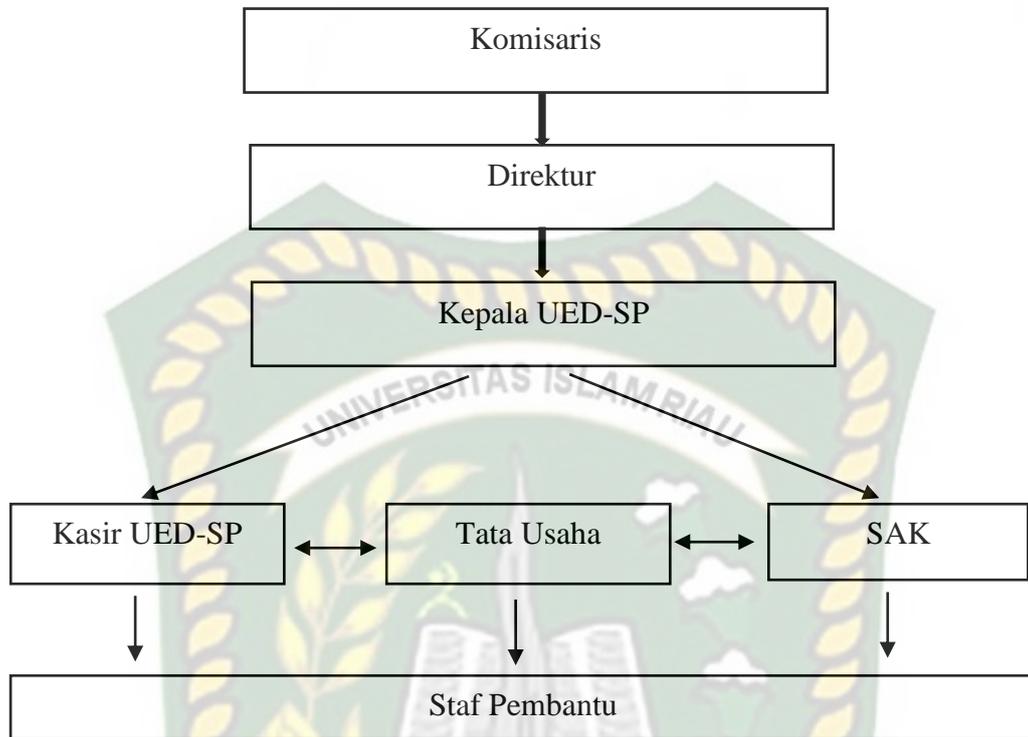
Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) adalah salah satu program yang berperan dalam membantu Masyarakat dalam mengembangkan usaha untuk menambah penghasilan sebagai Langkah penanggulangan kemiskinan. Yang bergerak di bidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi produktif dikelurahan yang bersangkutan yang berfungsi sebagai lembaga

keuangan desa untuk menyalurkan dana melalui mekanisme penyaluran kredit dan penarikan dari penyaluran kredit. (Perbup Bengkalis No 52 Tahun 2011)

Prinsip dasar Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam dalam Program Pemberdayaan Desa (PPD) dalam melaksanakan program ini harus transparan, memihak kepada masyarakat miskin, desentralisasi atau dapat dikerjakan oleh masyarakat, akuntabilitas, kompetisi sehat, termasuk dalam hal usulan, pemilihan pengelola, system pengelolaan serta penyaluran dana. Adapun tujuan pembentukan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) berdasarkan buku pedoman umum dan petunjuk teknis Ppd adalah :

1. Mengelola Dana Usaha Kelurahan Secara Profesional, transparan dan tanggung jawab, sesuai dengan fungsi dan peran.
2. Mengelola kegiatan simpan pinjam bagi masyarakat kelurahan.
3. Membantu pemerintah kelurahan dan LPM mencairkan alternatif pemecahan masalah.
4. Membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Melestarikan dan mengembangkan Dana Usaha Ekonomi Desa sebagai asset masyarakat kelurahan yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Struktur Organisasi Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)



Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP).

1. Komisaris
 - a. Berkewajiban memberikan nasihat kepada direktur dalam melaksanakan pengelolaan UED-SP
 - b. Berkewajiban memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan UED-SP
 - c. Berkewajiban mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan UED-SP
 - d. Berwenang meminta penjelasan dari Direktur mengenai persoalan yang menyangkut UED-SP

- e. Berwenang melindungi unit usaha terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja
- f. Berwenang menunjuk seseorang atau beberapa orang yang dianggap ahli untuk melakukan audit terhadap kinerja UED-SP apabila dianggap perlu
- g. Berwenang memberikan persetujuan terhadap susunan organisasi dan tatakerja
- h. Mendatangi Dokumen-Dokumen yang telah ditetapkan

2. Direktur

- a. Berkewajiban mengelola dan mengembangkan UED-SP agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan pelayanan umum masyarakat Desa
- b. Berkewajiban menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
- c. Berkewajiban melakukan Kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya
- d. Berkewajiban memimpin dan mengendalikan semua kegiatan UED-SP
- e. Berkewajiban menyiapkan rencana kerja dan rencana bisnis kepada komisaris tiap tahun
- f. Berkewajiban menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan

- g. Berkewajiban memberikan tugas kepada kepala usaha ekonomi desa
 - h. Berwenang membuat laporan keuangan ued tiap bulan
 - i. Berwenang membuat laporan perkembangan kegiatan ued tiap bulan
 - j. Berwenang menyampaikan laporan pertanggungjawaban ued tahunan melalui musyawarah desa selambat-lambatnya tiga bulan setelah tutup buku tahunan
 - k. Mendatangi Dokumen-Dokumen yang telah ditetapkan
3. Kepala (UED-SP)
- a. Mempimpin Pengurusan unit Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam
 - b. Melaksanakan rapat pengurus unut usaha ekonomi simpan pinjam setiap bulannya
 - c. Memastikan kelengkapan dokumen pencairan dana yang telah ditetapkan
 - d. Membuat kebijakn internal yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku
 - e. Mengusulkan kebutuhan karyaawan tambahan kepada direkut dan komisaris
 - f. Memeriksa dan memyampaikan laporan kepda Direktur
 - g. Mendatangi doukumen-dokumen yang telah ditetapkan
4. Tata Usaha (UED-SP)

- a. Membuat Profil UED
 - b. Menerima dan memverifikasi administrasi proposal permohonan pinjaman peminfaat
 - c. Menyiapkan kelengkapan dokumen pencairan dana
 - d. Membuat buku bio data peminfaat dan UED
 - e. Melakukan pengarsipan dan dokumentasi seluruh administrasi UED
 - f. Mendatangi dokumen-dokumen yang telah ditetapkan
5. Kasir UED-SP
- a. Menerima, menyimpan, membayarkan uang berdasarkan bukti administrasi keuangan yang sah
 - b. Membuat kas harian secara manual, buku monitoring, pinjaman manfaat, kartu bukti pembayaran angsuran peminfaat
 - c. Melaksanakan pembukuan administrasi keuangan simpan pinjam
 - d. Membuat dan melaporkan keuangan unit usaha ekonomi simpan pinjam kepada kepala usaha ekonomi desa simpan pinjam setiap akhir bulan
 - e. Menyetorkan uang kas ke rekening UED dan rekening tabungan masyarakat, dengan ketentuan yang kas ditangan kasir pada saat tutup buku laporan pencatatan keuangan akhir bulan maksimal 3.000.000 (tiga juta rupiah)

- f. Mengeluarkan surat keterangan yang menerangkan secara jelas kondisi uang kas jika uang kas saat tutup buku laporan pencatatan akhir bulan melebihi maksimal 3.000.000
 - g. Mengeluarkan surat kuasa penagihan dan penerimaan angsuran pemabayaran pemanfaat menunggak atas persetujuan ketua UED
 - h. Mendatangi dokumen-dokumen yang telah dimanfaatkan
6. Staf Analisis Kredit
- a. Melakukan penilaian kelayakan usaha yang telah diusulan calon pemanfaat.
 - b. Mengeluarkan rekomendasi besaran pinjaman calon pemanfaat
 - c. Menyampaikan hasil penilaian kelayakan usaha dan rekomendasi besaran pinjaman kepada peserta rrvat verifikasi akhir
 - d. Melakukan penilaian terhadap pemanfaat yang berhasil dalam mengembangkan usaha
 - e. Mendatangi dokumen-dokumen yang telah ditetapkan
7. Staf Pembantu
- a. Melakukan tugas-tugas pelayan umum
 - b. Membantu melaksanakan tugas-tugas teknis lapangan
 - c. Tugas sebagiamna 1 dan 2 dijabtrkan lebih lanjut dalam surat keputudan pengangkatan Staf Pembantu

8. Pengawas UED-SP
 - a. Pengawas berkewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja UED sekurang-kurangnya 1 tahun sekali
 - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja direktur
 - d. Mendatangi dokumen-dokumen yang telah ditetapkan

Adapun mekanisme Pinjaman Dana Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) yang ada pada Standar Operasional Prosedur (SOP) :

1. Besaran Pinjaman, Jasa dan Masa Pengembalian
 - a. Besaran Pinjaman yang diberikan kepada masyarakat dengan ketentuan :
 - i. Masyarakat yang mengajukan pinjaman pertama dapat diberikan pinjaman dengan batas maksimal Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
 - ii. Bagi masyarakat yang mengajukan pinjaman berikutnya dan dinilai disiplin melakukan pembayaran angsuran dapat diberikan pinjaman sekitar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
 - iii. Pinjaman sebagaimana dimaksud dari angka ii diberikan setelah pinjam sebagaimana dimaksud huruf a lunas.

b. Pinjaman yang diberikan kepada masyarakat dikenakan jasa antara lain :

- i. Bagi masyarakat rumah tangga miskin dikenakan jasa pinjaman sebesar 6% pertahun.
- ii. Bagi masyarakat yang tidak termasuk rumah tangga miskin dikenakan jasa pinjamana maksimal sebesar 10% pertahun
- c. Masa pengembalian pinjaman maksimal 60 bulan
- d. Besaran, jasa pinjaman dan masa pengembalian sebagaimana dimkasud Angka i, ii, dan iii lebih lanjut disepakati dalam musyawarah penguruh BUM Desa dan Pengurus Unit UED-Simpan Pinjam.

2. Persyaratan Pinjaman

- a. Proposal Persyaratan Pinjaman Pemanfaat perorangan :
 - i. Mengisi formulir surat permohonan pinjaman
 - ii. Melampirkan foto copy KTP dan KK
 - iii. Melampirkan photo usaha pemnfaat,photo anggunan dan photo pemanfaat 3 x 4
 - iv. Mengisi formulir perencanaan usaha
 - v. Memiliki keterangan surat usaha dari Kepala Desa bagi uuslan pinjaman diatas Rp. 15.000.000
 - vi. Bagi Aparatur Sipil Negara, Aparat Kelurahan, pegawai swsta bersedia dilakukan pemotongan

penghasilan jika melakukan penunggakan angsuran bermatrai Rp. 6000. Yang diketahui pemimpim dan bendahara masing-masing

- vii. Angunan Asli yang bernilai ekonomis
- viii. Mendatangkanin surat penyerahan anggunan (SPA) dua rangkap.
- ix. Mendatangkanin surat kuasa pemakain anggunan untuk anggunan pihak lain bermatrai Rp. 6000 dua rangkap
- x. Mendatangani suartg kuasa jual anggunan bermatrai Rp. 6000 dua rangkap
- xi. Mendatangkanin surat pemberian pinjaman kredit bermatrai Rp. 6000 dua rangkap.
- xii. Mendatangkanin perjanjian-perjanjian serta dokumen yang telah ditetapkan di UED-SP.

3. Ketentuan Anggunan dan Jaminan.

- a. Pemanfaat wajib menyerahkan anggunan dengan ketentuan antara lain :
 - i. Anggunan yang digunakan adalah barang bergerak atau benda yang bernilai ekonomis.
 - ii. Nilai anggunan yang digunakan harus bernilai diatas besaran pinjaman.
 - iii. Anggunan yang telah digunakan tidak dapat diambil atau pinjamkan sebelum dilakukan pelunasaan.

- b. Anggunan dari peminfaat yang kategori miskin atau kurang mampu disesuaikan dengan tidak memberatkan masyarakat miskin
 - c. Dalam hal ini masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak memiliki angunan, maka dapat dilakukan dengan surat pernyataan jaminan pihak ketiga untuk melunasi pinjaman jika terjadi tunggakan
 - d. Unit UED-SP bertanggung jawab menyimpan Angunan dan surat jaminan yang telah diserahkan.
4. Tahapan Verifikasi pinjaman
- a. Proposal yang telah diajukan wajib dilakukan verifikasi dokumen.
 - b. Tata Usaha UED-SP melaksanakan verifikasi dokumen proposal pinjaman, dalam hal dokumen proposal dinyatakan lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan maka tata usaha usaha memberikan disposisi untuk dilanjutkan verifikasi lapangan oleh staf analisis kredit
 - c. Vertifikasi/survey lapangan dilaksanakan oleh Staf Analisis Kredit dengan ketentuan yaitu :
 - i. Menilai kelayakan usaha dan Rencana Usaha Peminfaat.
 - ii. Memastikan pinjaman mendapat persetujuan ahli waris

- iii. Melihat keberadaan agunan dengan pinjaman
 - iv. Menghitung modal pemanfaat dari usaha lain.
 - v. Menilai pemahaman calon pemanfaat terhadap program.
- d. Hasil survey lapangan ditungkan dalam bentuk Rekomendasi yang dikeluarkan Staf Analisa Kredit untuk dibahas dalam Rapat Vertifikasi penetapan bearan pinjaman
 - e. Rapat vertifikasi penetapan besaran pinjaman sebagaimana dimkasud huruf d
 - f. Pembahasan rapat verifikasi penetapan besaran pinjaman.
 - g. Sebelum dilakaukan pencairan dana pinjaman ketua UED-SP melakukan verifikasi berkas pemanfaat dalam SPP diantaranya SPA,SKPA, Angunan Asli, SKJA dan SP2K dan mengeluarkan lembaran rekapan kelengkapan dokumen
5. Pencairan dan penyaluran Pinjaman
- a. Komisariss dan Direktur melakukan rapat setelah tahap verifikasi selesai dan meberikan hasil rapat kepada ketua UED-SP
 - b. Jika hasil rapatnya efektif dan efesien maka dana akan di cairkan dalam waktu 1 minggu atau 7 hari
 - c. Ketua UED-SP membuat dan mengajukan surat permohonan pencairan dana ke Bank yang menampung Dana UED-SP dengan melampirkan.

- i. SPP
 - ii. Buku Rek UED-SP dan specimen tanda tangan Direktur, ketua UED-SP dan kasir UED-SP
- d. Dana pinjaman paling lambat 1 x 24 jam setelah persetujuan pencairan dari Bank
- e. Kasir UED-SP berkewajiban membuat kwitansi penyerahan dana pinjaman yang ditandatangani peminfaat sebelum dana disalurkan
- f. Dalam penyaluran dana pinjaman dapat dilakukan melalui transfer rekening.
6. Pembayaran Angsuran
- a. Peminfaat pinjaman Dana UED-SP dikembalikan melalui pembayaran angsuran pokok dan jasa berdasarkan perjanjian yang tertuang dalam SP2K dan ketentuan lain yang telah ditetapkan
 - b. Pembayaran angsuran dilakukan di kantor UED-SP pada hari kerja dengan mendatangi bukti pembayaran di buku monitoring peminfaat dan dokumen lain yang telah disiapkan oleh unit Usaha Simpan Pinjam.
 - c. Pembayaran Angsuran pokok dan jasa dapat dilakukan melalui transfer antar rekening dan bukti transfer diserahkan paling lambat sebelum tutup buku laporan keuangan akhir ulan ke kasir UED-SP untuk dilakukan pencatatan pembukuan pembayaran angsuran pinjaman.

Dari laporan perkembangan Pinjaman (LPP) Usaha Ekonomi Desa- Simpan Pinjam dapat dilihat data-data mengenai jumlah pencairan dan realisasi dana, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel perguliran berikut :

Tabel. I.1 Laporan Perguliran Dana Beserta jumlah Peminjam UED-SP di Desa Tenggau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2019

No	Perguliran	Jumlah Pemanfaat (Orang)	Jumlah Dana (Rp)
1	Perguliran 1	30	646.000.000
2	Perguliran 2	29	609.000.000
3	Perguliran 3	15	349.000.000
4	Perguliran 4	28	618.000.000
5	Perguliran 5	11	83.000.000
6	Perguliran 6	20	341.000.000
7	Perguliran 7	11	212.000.000
8	Perguliran 8	13	266.000.000
9	Perguliran 9	20	341.000.000
10	Perguliran 10	28	618.000.000
11	Perguliran 11	11	212.000.000
12	Perguliran 12	13	266.000.000
Total		157 Orang	Rp. 3.124.000.000

Sumber : Kantor UED-SP Tahun 2019

Menurut keterangan Tabel di atas dapat dilihat perguliran dana pada tahun 2019 Perguliran dana 12 perguliran dana usaha ekonomi desa yang digulirkan pada sebanyak 157 orang pemanfaat dengan jumlah sebanyak Rp. 3.124.000.000

**Tabel I.2 Data Peminjam UED-SP Jenis Pembyaran di Desa Tenganau
Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis**

No	Kriteria Pemanfaat	Jumlah (Orang)
1	Pemanfaat yang membayar lancar	60
2	Pemanfaat yang menunggak	97
Total		157 Orang

Sumber : Kantor UED-SP Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah seluruh pemanfaat Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam di Desa Tenganau selama 1 tahun 157 orang. Pemanfaat yang membayar lancar selama tahun 2019 60 orang, sedangkan pemanfaat yang menunggak 97 orang.

**Tabel I.3 Jenis Usaha dan Jumlah Anggota Pemanfaat UED-SP Berdasarkan
Jenis Pembayaran di Desa Tenganau Kecamatan Pinngir
Kabupaten Bengkalis.**

No	Jenis Usaha	Jumlah Peminjam	Jumlah Dana (Rp)
1	Perdagangan	50	1.185.000.000
2	Perkebunan	89	1.630.000.000
3	Perikanan	1	25.000.000
4	Peternakan	7	72.000.000
5	Industri Kecil	6	68.000.000
6	Jasa	4	144.000.000
Jumlah		157	Rp. 3.124.000.000

Sumber : Kantor UED-SP Tahun 2019

Berdasarkan data table 1.3 bahwa mayoritas masyarakat pemanfaat program (UED-SP) di Desa Tenganau dari kalangan usaha perkebunan bahwa terdapat 89 orang pengguna dana dengan total Rp.1.630.000.000

Berdasarkan fenomena dilapangan, maka ditemui permasalahan yakni Adapun permasalahan yang terkait Program Usaha ekonomi Desa- Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis adalah :

1. Masih Kurangnya Edukasi Pengelola Usaha Ekonomi Desa- Simpan Pinjam (UED-SP) Kepada Masyarakat mengenai Fungsi (UED-SP) Untuk Memberdayakan Masyarakat
2. Dalam hal pembayaran, Masyarakat pemanfaat tidak mengembalikan dana pinjaman dalam siklus yang ditetapkan, dalam hal ini dikarenakan usaha yang mereka jalani mengalami kemacetan.
3. Dari jumlah KK 1.014, hanya 157 orang saja (4,7%) yang menjadi pemanfaat. Artinya masih banyak masyarakat yang lebih mengandalkan Bank konvensional dibandingkan UED-SP.

Atas dasar latar belakang masalah yang ada, diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul : “ **Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis** ”

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dari fenomena yang diuraikan pada perumusan masalah diatas, maka dirumuskan permasalahan peneliti ini adalah :

1. Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis?
2. Apakah Hambatan-Hambatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk :

- a. Menganalisis Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Desa- Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.
- b. Mengetahui Apakah Hambatan-Hambatan Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

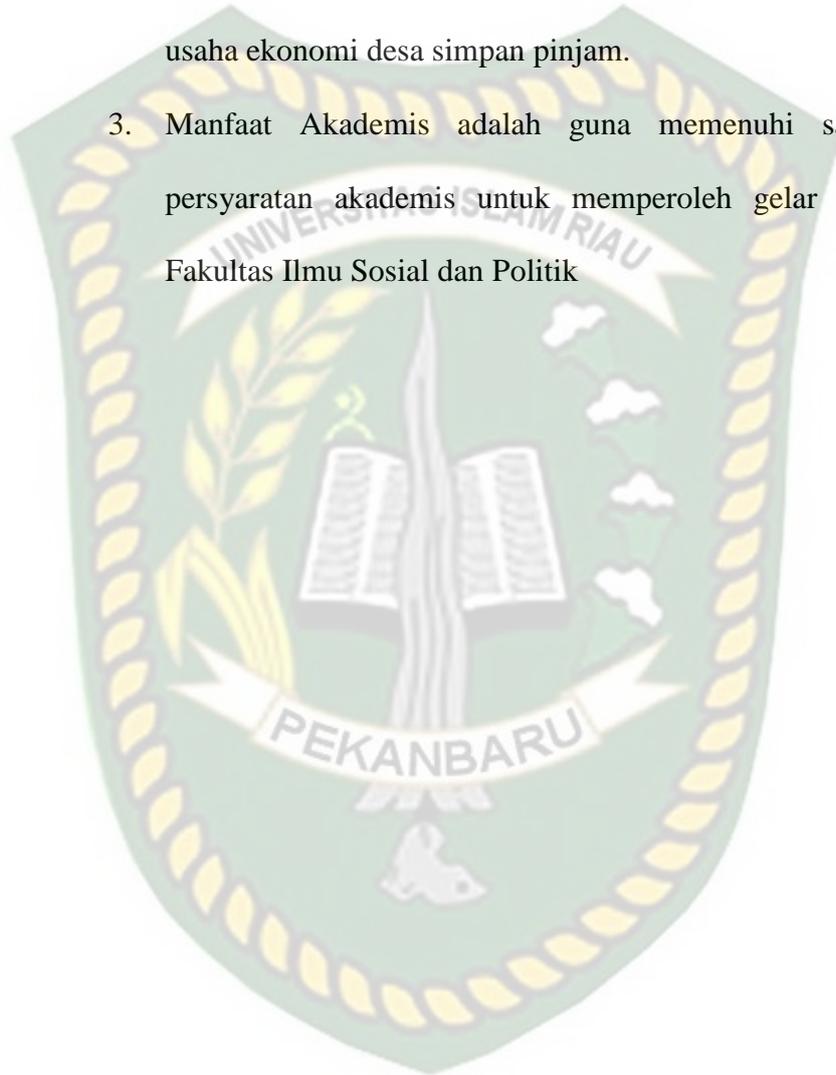
2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis yang diharapkan pada penelitian ini adalah munculnya pengetahuan baru terhadap pengetahuan sebelumnya tentang pelaksanaan program usaha ekonomi desa

simpan pinjam di desa tengganau kecamatan pinggir kabupaten bengkalis.

2. Manfaat Praktis dalam penelitian ini akan dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan, maupun pelaksanaan program usaha ekonomi desa simpan pinjam.
3. Manfaat Akademis adalah guna memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A Studi Kepustakaan

Sebagai acuan untuk menjawab tujuan penelitian ini dengan mengembangkan beberapa studi kepustakaan yang relevan dengan masalah penelitian. Penulis mengemukakan beberapa konsep-konsep yang mendukung berkaitan dengan variable yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan yang terjadi antara lain :

1. Konsep Administrasi

Menurut Zulkifli (2005;16) administrasi diartikan dengan berbagai bentuk keterangan tertulis dalam studi administasi dikonsepskan menjadi dua yaitu :

1. Administrasi secara sempit adalah sebagai bentuk aktivitas yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan sederhana, ketik mengetik, dan kegiatan lain yang sifatnya teknis ketatausahaan.
2. Administrasi secara luas adalah semua proses Kerjasama antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencapai target dengan memanfaatkan saran dan prasarana tertentu.

Zulkifli (2005;20) terdapat tiga pengertian subtansial yang terkandung dalam sejumlah konsep administrasi yaitu :

1. Bahwa administrasi dapat dipandang sebagai seni. Keberhasilan penerapannya memerlukan kiat-kiat tertentu yang bersifat sangat

situsioanal dan kondisional. Administrasi sangat terkait pada aspek kondisi,situasi,waktu dan tempat dimana dijalankan.

2. Bahwa dalam konsep administrasi terdapat unsur -unsur : adanya dua manusia atau lebih adanya tujuan yang hendak dicapai adanya tugas-tugas yang harus diselesaikan adanya perlengkapan dan peralatan untuk melaksanakan tugas dan adanya pertimbangan rasionalitas dalam merumuskan dan menyediakan setiap unsur tersebut diatas.
3. Bahwa administrasi sebagai suatu proses kerja sama buakn merupakan konsep yang baru. Dia sudah ada dan dijalankan sejak manusia sudah mengenal peradaban. Tentang keberadaban administrasi sebagai proses Tindakan.

Defenisi Administrasi menurut Sondang P. Siagian (2016:42), administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rosionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk mencapai tujuan yang ditentukan maka diperlukanya organisasi yaitu sebagai wadah atau tempat dalam melangsungkan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efesien.

Adminstrasi menunjukkan adanya sejumlah unsur-unsur administrasi untuk mencapai tujuan tertentu,kelompok yang bekerjasama memerlukan seperangkat instrument yang saling terkait. Artinya tanpa adanya unsur-unsur tersebut,tujuan yang telah ditetapkan atau yang dikehendaki tidak

akan tercapai. Menurut Wirman Syafri.(2012:11-13) adanya unsur-unsur administrasi adalah sebagai berikut :

1. Organisasi
2. Manajemen
3. Komunikasi
4. Kepegawaian
5. Keuangan
6. Perbekalan
7. Hubungan Masyarakat.

2. Konsep Organisasi

Menurut Sondang P. Siagian (2004:06), organisasi merupakan bentuk persekutuan yang dilakukan dua orang atau lebih.yang bekerja sama dalam sebuah ikatan yang formal. Untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.dalam melakukan kerjasama tersebut beberapa orang disebut sebagai atasan dan lainnya merupakan bawahan. Defenisi diatas menunjukkan bahwa organisasi dapat dilihat dari dua segi pandangan,yaitu sebagai berikut:

1. Organisasi sebagai wadah dimana kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan.
2. Organisasi sebagai rangkaian hirarki dan interaksi antara orang-orang dalam suatu kegiatan formal.

Konsep organisasi (organization) merupakan titik sental dari maksud dan tujuan diaplikasikanya setiap aspek studi administrasi. Bahwa

keberadaan setiap aspek studi administrasi itu dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada kebijakan operasional dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efesiensi organisasi (Zulkifli 2015;15)

Menurut Zulkifli dan Nurmasari (2015:99) organisasi dapat didefenisikan sebagai berikut :

1. Organisasi dalam arti badan yaitu kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Organisasi dalam arti badan yaitu gambaran skematis tentang hubungan Kerjasama dari orang-orang yang terlibat, dalam organisasi untuk mencapai tujuan Bersama.

Menurut zulkifli dan Nurmasari (2015;99) Unsur-unsur dasar yang membentuk organisasi yaitu :

1. Adanya tujuan Bersama
2. Adanya Kerjasama dua orang atau lebih
3. Adanya pembagian tugas
4. Adanya kehendak untuk bekerja sama

Seperti halnya administrasi, organisasi juga merupakan salah satu fenomena sosial masyarakat modern. Melalui organisasi, orang dapat memenuhi dan mencapai berbagai kebutuhan dan tujuannya. Oleh sebab itu, akan dijumpai beragam prinsip yang mereka pegang dalam memanfaatkan organisasi sebagai alternative alat untuk mencapai tujuan.

Menurut Atmosudirdjo (dalam Zulkifli, 2009;39) merumuskan prinsip prinsip organisasi sebagai berikut:

1. Organisasi itu harus mempunyai tujuan, yakni suatu tujuan yang hanya dapat dicapai melalui daya upaya (efforts) kerjasama yang teratur dan kontinu antara orang-orang yang bersangkutan. Prinsip ini membawa konsekuensi, bahwa harus ada kesatuan pimpinan (unity of command) dan kesatuan arah gerak (unity of direction).
2. Harus ada pembagian kerja dan penugasan kerja yang homogen. Untuk tercapainya pencapaian tujuan organisasi dibutuhkan daya upaya (inisiatif) dari seluruh personil organisasi. Oleh karena itu seluruh pekerjaan harus terbagi habis menjadi keveling-keveling kerja, dan dijaga sampai ada batasbatas kaveling kerja yang tidak jelas atau tegas..
3. Antara tugas, tanggungjawab, dan kekuasaan (wewenang) harus selalu terdapat kesesuaian serta keseimbangan. Artinya, luas dan beratnya tugas. Demikian pula, maka luas beratnya kekuasaan yang diberikan harus sesuai dengan luas dan beratnya tanggung jawabnya. Bila prinsip ini dilanggar, maka pasti akan terjadi berbagai perbincangan dalam berbagai macam bentuk.
4. Setiap pelimpahan kekuasaan dan tugas harus dilakukan setepat-tepatnya dan jelas-jelasnya. Tepat orang, tepat tugas dan jelas batas-batasnya. Pendelegasian tugas dan wewenang atau kekuasaan harus jelas bagi kedua belah pihak-pihak pendelegasian dan penerima delegasi. Pelimpahan tugas dan wewenang sedapat mungkin tertulis dan dirumuskan dengan kata-kata yang jelas,

mudah dipahami, menunjukkan isi materinya, dan batas-batasnya yang tegas, bilamana tidak memungkinkan tegas, maka harus disertai suatu “policy” yang memberikan pedoman untuk menilai kasus-kasus praktek.

5. Kesatuan komando atau hirarkhi (the one man one chief principle). Penyusunan organisasi harus mengikuti garis-garis tatahubungan bawahan atas. Semua harus komando, perintah, laporan, informasi, kerja, penfasilitasan kerja dan sebagainya, harus melalui garis-garis hirarkhi ini sebagai prinsip. Didalam praktek prinsip ini harus dipegang teguh, akan tetapi tidak boleh kaku, agar supaya tidak macet.
6. Komunikasi. Kelompok organisasi tergantung dari komunikasi, yakni pertukaran informasi antar sesama unit kegiatan yang terdapat dalam organisasi bersangkutan. Kelancaran harus dan ketepatan data dan informasi yang relevan sangat membantu pimpinan dalam mengambil keputusan yang tepat.
7. Kewajiban pimpinan untuk mengadakan pengecekan terhadap pelaksanaan perintah-perintahnya. Pengecekan ini bersifat organisasional. Artinya merupakan bagian integral dari pada kehidupan organisasi. Dengan demikian tidak ada pimpinan yang bisa mengontrol segala-galanya, malahan yang demikian itu mendatangkan efek yang tidak baik terhadap motivasi kerja bawahan.

8. Kontinuitas, artinya pekerjaan tidak boleh mandeg (terhenti) karena seorang berhalangan. Oleh karena itu untuk bidang kerja yang sifatnya rutinitas sebaiknya ditunjuk seorang untuk beberapa orang sebagai pelaksana jika personil yang telah ditunjuk sebagai pelaksana dan penanggung jawab kerja bersangkutan berhalangan.
9. Saling asuh antara instansi line dan staf. Hal ini penting sekali terutama didalam organisasi yang sudah mulai kompleks operasinya. Yang harus dicegah adalah jangan sampai, karena berbagai hal atau sebab, suatu unit kerja merasa lebih penting atau dipentingkan diatas unit kerja lainnya.
10. Koordinasi. Prinsip ini adalah pelengkap prinsip kedua diatas, pembagian kerja menimbulkan spesialisasi, spesialisasi mempercepat peningkatan keahlian, akan tetapi mengandung bahaya desintegrasi. Untuk itu penunjukkan pelaksanaan masing-masing bidang tugas terjamin untuk bisa bekerja berdampingan. Kebijakan yang dapat mengembangkan koordinasi antara lain adalah kewajiban bertukar informasi dan bertukar pikiran setiap kali timbul masalah-masalah bersama, dan menanamkan kebiasaan untuk saling berkonsultasi satu sama lain bila menghadapi pekerjaan yang ada hubungannya dengan bidang pekerjaan unit organisasi lainnya.

3. Konsep Manajemen

Manajemen diambil dari Bahasa Perancis Kuno, yaitu management, yang artinya seni dalam mengatur dan melaksanakan. Manajemen dapat diartikan sebagai upaya perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif. Efektif dalam hal ini ialah mencapai tujuan sesuai perencanaan, sedangkan efisien adalah melaksanakan pekerjaan dengan benar, terorganisasi, dan selesai sesuai jadwal. Ada tiga alasan utama mengapa manajemen diperlukan yaitu :

1. Manajemen diperlukan agar tujuan pribadi dan organisasi dapat tercapai.
2. Manajemen juga diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran, dan kegiatan, yang saling bertentangan dari pihak dalam organisasi.
3. Manajemen diperlukan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas suatu kerja organisasi.

Menurut Sondang P. Siagian (2003;5), manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

George R. Terry (dalam D. J. Prinsa dan Agus Garnida, 2013;33) menyebut unsur manajemen dengan istilah “6M”, unsur-unsur manajemen tersebut perlu disinergikan agar tujuan organisasi bisa tercapai dengan efektif dan efisien. “6M” tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tenaga Kerja (Men) Tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja eksklusif maupun operatif.
2. Dana (Money) Uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Metode (Methods) Cara-cara yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan.
4. Material (materials) Bahan-bahan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan.
5. Mesin (machines) Mesin-mesin atau alat-alat yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
6. Pasar (Market) Pasar untuk menjual hasil.

4. Manajmen Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah salah satu sumber daya yang terdapat didalam organisasi. Yang meliputi semua orang yang melakukan aktivitas atau kegiatan. Unsur *man (manusia)* sangat penting sebagai sumber daya yang fukup potensial, yang perlu dikembangkan sedemikian rupa agar mampu membrikan konstribusi yang maksimal bagi organisasi untuk pengembangan dirinya, oleh karena itu manusia perlu dimanajemen.

Menurut Hasibuan (2013;10) manajemen sumber daya manusia adalah ilmu seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan, perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Menurut Gray Dessler (2016;8) sumber daya manusia adalah kebijakan dari praktik yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan aspek “orang” atau SDM dari posisi seorang manajemen, meliputi perekrutan, penyingkapan, pelatihan, pemberian imbalan, dan penilaian.

Dari beberapa konsep diatas maka dapat disimpulkan bahwa tanpa sumber daya manusia, maka sumber daya lainnya kurang bermanfaat dalam mencapai organisasi maka untuk itu sangat diperlukan sumber daya manusia sebagai pengatur bagaimana untuk menjalankan sebuah organisasi yang telah dibentuk dengan memanfaatkan sumber daya organisasi yang ada.

5. Konsep Kemiskinan

Menurut Nurwati (2008) Kemiskinan merupakan masalah sosial yang terus ada di kehidupan masyarakat. Masalah kemiskinan sangatlah lama, dan dalam waktu yang Panjang, sama seperti halnya dengan usia manusia itu sendiri, dan unsur pokok permasalahannya adalah menyangkut bagian macam bentuk atau karakter kehidupan manusia. Dengan kata lain bahwa kemiskinan ini merupakan masalah kehidupan yang sifatnya global atau mendunia, artinya masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia, dan masalah tersebut ada di semua negara, walaupun dampak dari kemiskinan sangatlah berbeda-beda.

Menurut Suryawati, (2005) kemiskinan dapat dilihat dari ciri-ciri kelompok penduduk sebagai berikut:

- a. Mempunyai Pendidikan yang rendah
- b. Kebanyakan mempunyai usaha sendiri atau bekerja dalam sector informal, yang sifatnya kecil;
- c. Tidak mempunyai faktor produksi sendiri misalnya tanah, keterampilan dan peralatan untuk bekerja
- d. Kurangnya memperoleh fasilitas umum

Kemiskinan disebabkan oleh dua hal antara lain yang pertama kemiskinan disebabkan karena sifat alami, sifat yang timbul dari perilaku masyarakat atau seseorang yaitu:

- a. Keterbatasan sumber daya modal dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dapat diartikan kualitas sumber daya manusia misalkan keterampilan, Pendidikan, dan Pengetahuan.
- b. Tempat atau letak geografis suatu wilayah yang terpencil dan yang sulit untuk dijangkau, yang mengakibatkan sulit berinteraksi dengan penduduk yang maju.
- c. Pembangunan yang kurang memperhatikan Kawasan atau wilayah yang terpencil atau sulit dijangkau.

6. Konsep Pembangunan

P. Siagian (2012:3) mengartikan sebagai usaha atau rangkaian usaha atau perumbuhan dan perubahan yang sederhana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modern

dalam rangka peminana bangsa. Sedangkan menurut Binarto Tjokroamidjo (2011:13) pembangunan ialah merupaka suatu proses pembaruan yang selanjutnya dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang akan sangat baik.

Pembangunan adalah hal yang sangat penting menjadi tolak ukur keberhasilan suatu negara. Oleh karena itu konsep-konsep pembangunan dapat munculakan teori dengan seirng perkembangan zaman. Pembangunan bukan hanya semata fenomena, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melewati sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia.

Gent Suryoo (2009:31) pembangunan memiliki tujuan dan ada dua tahapnya yaitu. Pertama pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan pada masyarakat jika tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya, maka tahap Kedua adalah, menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk mendapatkan hidup Bahagia dan terpenuhi semua kebutuhannya. Untuk mencapai tujuan ini maka banyak aspek yang harus diperhatikan, diantaranya ialah keterlibatan masyraakat dalam pembangunan.

7. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” artinya kekuatan atau kemampuan. Dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdayauntuk memperoleh proses daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian

daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang belum berdaya. Pengertian “Proses” menunjukkan pada tindakan yang dilakukan secara kronologi yang mencerminkan tahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang berdaya menuju keberdayaan. (Ambar Teguh,2004)

Berbeda dengan pendapat Pranarka yang menyampaikan pemberdayaan sebenarnya sebenarnya ialah merupakan istilah yang khas Indonesia yang diterjemahkan sebagai empowerment dan istilah itu benar tapi tidak tepat. Pemberdayaan yang ini adalah memberi “daya” bukan “kekuasaan” daripada “pemberdayaan” itu. Barangkali istilah yang paling tepat adalah “energize” pemberdayaan adalah pemberian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri (Ambar Teguh 2004)

Pemberdayaan menurut (Siagian,2012:12) pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk menggali dan membangkitkan segenap potensi yang ada dalam individu atau organisasi agar dapat memberi manfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya.

Secara Konseptual pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom),dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat,melainkan bebas dari kelaparan,bebas dari kebodohan,bebas dari kesakitan, menjangkau sumber-sumber produktif

yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatnya dan memperoleh barang -barang dan jasa yang mereka perlukan, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut Suharto (2006:76) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki..Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan upaya untuk menjadikan masyarakat lebih berdaya dan berkemampuan sehingga mereka dapat mewujudkan potensi kemampuan yang mereka miliki. Dalam proses pemberdayaan biasanya ada yang disebut subjek dan objek. Subjek adalah orang/ kelompok yang memberdayakan, sedangkan objek adalah orang/ kelompok yang diberdayakan.

Sedangkan Menurut Widjaja (2003:169) Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi dimiliki masyarakat, masyarakat dapat mewujudkan jati diri,dan martabatnya secara maksimal secara bertahan dan mengembangkan diri secara manual baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Berbagai bentuk program pemberdayaan masyarakat desa juga dapat dilakukan dengan membentuk Kopersi Desa ataupun satu Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP).

Berdasarkan definisi pemberdayaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuan

kukasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya..

Adapun cara yang di tempuh dalam malakuakan pemberdayaan yaitu dengan memberikan motivasi atau dukungan berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, meningkatkan kesadaran tentang potensi yang di miliknya, kemudian berupaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki tersebut.

b. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang dilakukan mereka. Kemandirian masyarakat adalah suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai untuk kemampuan memikir.

Terjadinya keberdayaan pada empat aspek (Kognitif, konatif, efektif dan psikomotorik) pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, kerna demikian dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan yang dilengkapi dengan

keterampilan mandiri, melalui proses belajar maka masyarakat secara terhadap akan memperoleh kemampuan dari waktu dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal (Ambar Teguh,2004 :80-81)

c. Tahap-Tahap Pemberdayaan

(Sumodinigrat,2000 dalam buku Ambar Teguh,2004:82)

Pemberdayaan tidak bersifat selamanya melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri. Dilihat dari pendapat berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran.

Sebagaimana disampaikan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat berlangsung bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan

dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan

3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian (Ambar Teguh 2004:83)

8. Konsep Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah salah satu program untuk pengangulungan kemiskinan sebagai upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah. Pemerintah memberikan sejumlah dana kepda masyarakat desa agar masyarakat desa ikut serta aktif dalam pembangunan. Dana bantuan yang dimkasut diberi nama Dana Usaha Desa pemnfaat dana harus memperhatikan sumber daya serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarkat setempat

(UED-SP) adalah singkatan dari Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam, yaitu lembaga desa yang bergerak dibidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi produktif yang bersangkutan. Usaha Ekonomi ini meliputi seluruh kegiatan usaha baik perorangan ataupun kelompok yang merupakan prakasa dari masyarakat itu sendiri untuk meningkatkan kehidupanya yang meliputi :

1. Pertanian ialah kegiatan sumber daya yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan. Contohnya :tanaman pangan

2. Perdagangan ialah kegiatan tukar menukar barang atau jasa kedaunya yang berdasarakan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Contohnya :kios, warung, dll
3. Perternakan adalah kegiatan mengembangkan dan pemeliharaan hewan untuk mendapatkan manfaat dari hasil dari kegiatan tersebut. Contohnya: ayam, itik, kambing, sapi, dll
4. Perkebunan segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dalam ekosistem yang sesuai mengelolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut. Contohnya : sawit, karet, kelapa, dll
5. Perikanan berasal dari kata ikan yang berarti segala kegaitan yang berhubungan dengan ikan. Contohnya; tambak, pancing.
6. Jasa adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen Contohnya :bengkel, salon, servis hp, somputer, dll
7. Industri Kecil adalah industry yang hanya memiliki karyawan maksimal 19 orang memiliki nilai investasi kurang dari 1 M tidak termasuk tanah dan bangunan. Contohnya : pembuatan minyak kelapa sawit, batu bata, pengelolaan hasil karet.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 06 Tahun 1998 pasal 1 dalam poin d, yang dimaksud dengan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), merupakan suatu lembaga yang bergerak dibidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa yang diusahakan serta dikelola oleh

masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Menteri No.42 Tahun 2007 bahwa usaha ekonomi desa simpan pinjam dalam lembaga keuangan dalam memberikan pinjaman bergulir kepada masyarakat kelurahan dengan syarat ketentuan yang berlaku.

Usaha perekonomian desa adalah semua usaha ekonomi yang diusahakan oleh masyarakat baik secara perorangan ataupun kelompok. UED-SP juga dikatakan lembaga keuangan mikro sebagai upaya penyediaan jasa keuangan, terutama simpanan dan kredit jasa keuangan lain yang diperlukan bagi keluarga miskin dan berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses terhadap bank komersial.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa bahwa yang dimaksud dengan tujuan pembentukan pengelola UED-SP yaitu :

1. Mengelola dana usaha desa secara professional, transparan dan tanggung jawab, sesuai dengan fungsi peran dan tanggung jawabnya.
2. Mengelola kegiatan simpan pinjam bagi masyarakat desa.
3. Membantu pemerintahan kelurahan mencari alternatif pemecahan masalah.
4. Membantu masyarakat mengembangkan dana usaha ekonomi desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Melestarikan dan mengembangkan dana ussha ekonomi sebagai asset bagi masyarakat yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Adapun Pemberdayaan dalam Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam sebagai berikut :

1. Pendataan dan Verifikasi adalah kegiatan mendata dan menilai proposal yang akan mengajukan pinjaman dana usaha ekonomi desa-simpan pinjam
 - a. Pendataan dan verifikasi dilakukan oleh staf analisis sebelum mendapatkan pinjaman
 - b. Mengajukan permohonan dan anggaran
 - c. Menilai proposal yang akan diajukan
 - d. Menilai proposal sesuai dengan usaha yang dilakukan
 - e. Menilai tentang kelayakan usaha
2. Penyaluran adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan
 - a. Pemanfaat dan membuat surat perjanjian pemberian pinjaman
 - b. Pengelola membuat surat perjanjian pemberian pinjaman
 - c. Berdasarkan surat perjanjian pemberian pinjaman ditransfer ke rekening
 - d. Dilakukan sesuai dengan kebutuhan usaha
 - e. Pengelola membuat rencana pencairan dana

3. Pengembalian ialah secara sederhana diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan mengembalikan.
 - a. Angsuran selama 60 bulan
 - b. Suku bunga 10% pertahun
4. Dampak secara sederhana dapat artikan sebagai pengaruh atau akibat, setiap keputusan yang diambil mempunyai dampak tersendiri.
 - a. Meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan
 - b. Mengurangi ketergantungan masyarakat dari rentenir

Program Usaha Ekonomi Desa dalam bentuk dana yang bergulir adalah bagian dari Gerakan penanggulangan, dimana merupakan salah satu strategi pemerataan pembangunan di didesa dan upaya dalam mengembangkan ekonomi rakyat pada masa otonomi daerah. Kegiatan dana bergulir ini bertujuan untuk memutar roda usaha rakyat secara berkeimbangan melalui pembinaan dan pemberian modal, dan akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dapat memutar roda perekonomian lebih baik.

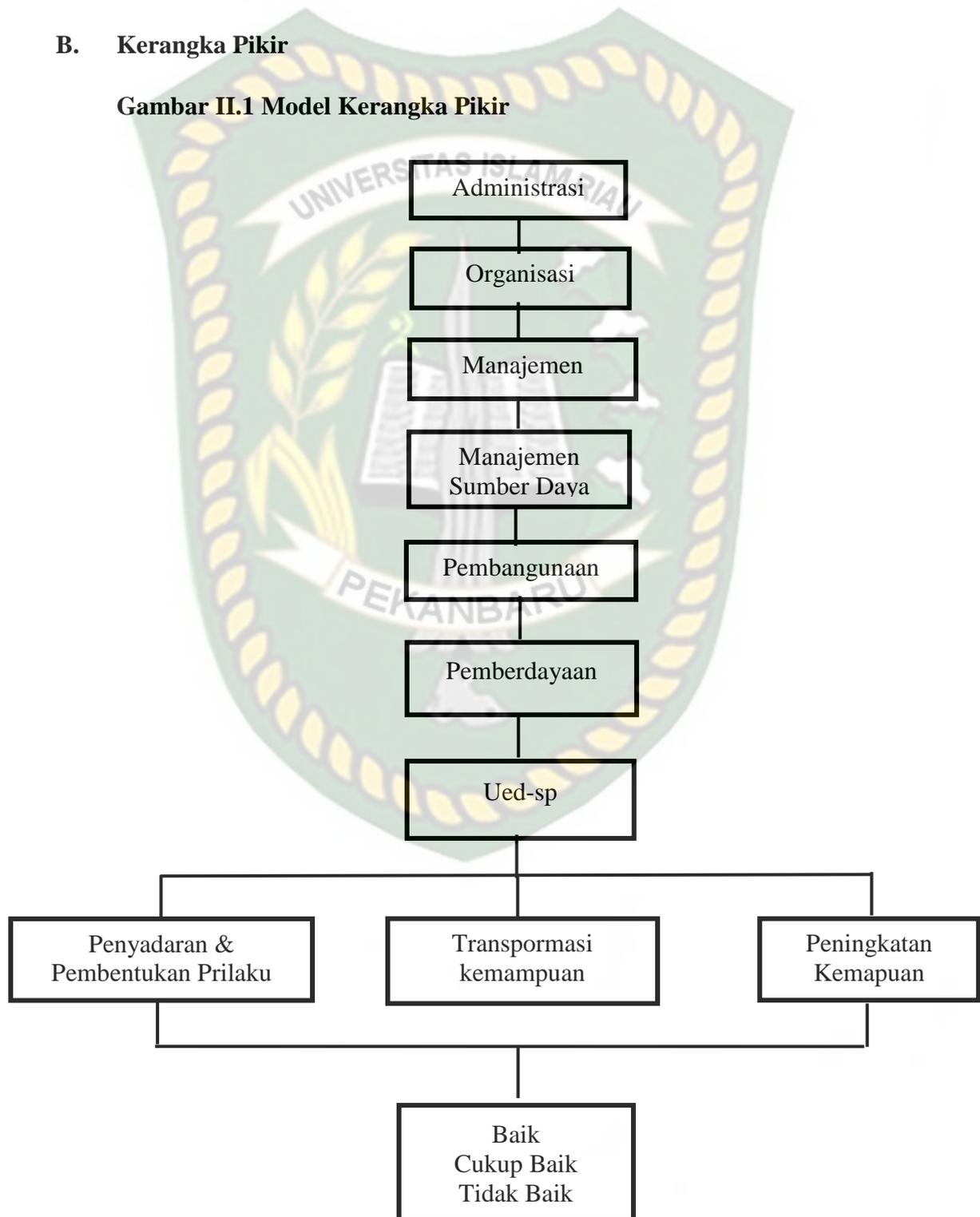
Adapun visi Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam (UED-SP) adalah menjadi salah satu lembaga desa yang mampu mensejahterakan masyarakat dari kemiskinan.

Sedangkan misi Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) yaitu

- a. Meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah
- b. Mendorong usaha sector onformal untuk penerapan tenaga kerja bagi masyarakat desa

B. Kerangka Pikir

Gambar II.1 Model Kerangka Pikir



Sumber : Modifikasi dari Sejumlah dasar teoritis

C. Hipotesis

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yakni : Diduga Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis belum terlaksana dengan baik, sehingga menghambat peraturan bupati.

D. Konsep Operasional

Guna menghindari dari keliruan dalam penggunaan istilah di dalam penulisan ini, maka berikut ini penulis akan menuangkan konsep-konsep yang telah dipaparkan sebelumnya dalam bentuk nyata secara operasionalnya tentang hasil kajian sebagai berikut :

1. Administrasi adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, dimulai dari proses pemikiran, proses pelaksanaan sampai proses tercapainya tujuan.
2. Organisasi adalah sebagai suatu kelompok individu yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi memiliki tujuan umum dan tujuan spesifik, untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibuat norma aturan yang dipatuhi oleh semua anggota organisasi.
3. Manajemen adalah suatu yang dilakukan bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dengan melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*Controlling*)

4. Manajemen Sumber Daya Menurut Hasibuan (2013;10) manajemen sumber daya manusia adalah ilmu seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan, perusahaan, karyawan, dan masyarakat.
5. Pembangunan ialah merupakan suatu proses pembaruan yang selanjutnya dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang akan sangat baik.
6. Pemberdayaan (Ambar Teguh 2004 :77) Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh dan proses pemberian daya atau kekuatan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.
 - a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.
 - b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan
 - c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian (Ambar Teguh 2004:83)
7. UED-SP Usaha perekonomian desa adalah semua usaha ekonomi yang diusahakan oleh masyarakat baik secara perorangan ataupun kelompok.

UED-SP juga dikatakan lembaga keuangan mikro sebagai upaya penyediaan jasa keuangan, terutama simpanan dan kredit jasa keuangan.

E. Operasionalisasi Variabel

Tabel II.1 : Operasional Variabel Penelitian Tentang Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP)

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penelitian	Kategori Penelitian
1	2	3	4	5
Pemberdayaaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh dan proses pemberian daya atau kekuatan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang aatu belum berdaya. (Ambar Teguh 2004:77)	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP)	1. Penyadaran dan Pembentukan Prilaku 2. Transpormasi Kemampuan 3. Peningkatan Kemampuan	a. Pendanaan b. Pembangunan sistem a. Pelaksanaan Program UED-SP b. Pengembalian Dana a. Kompetensi Petugas UED-SP b. Partisipasi Masyarakat	Baik Cukup Baik Tidak Baik Baik Cukup Baik Tidak Baik Baik Cukup Baik Tidak Baik

Sumber : Modifikasi Penelitian 2020

F. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, maka penulis melakukan pengukuran dengan menggunakan *skala likert*. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok yang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert maka variable yang akan diukur dijabarkan menjadi indicator variable, dan indicator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan dan pertanyaan Sugiyono (2010:93)

Dengan mengajukan item pertanyaan yang terdiri dari tiga jawaban yaitu a, b, c masing-masing jawaban diberi nilai sebagai berikut :

1. Penysadaran dan Pembentukan Prilaku

Baik : Apabila setiap indicator dari Pemberdayaan masyarakat Pada Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir dilaksanakan atau jawaban responden berada pada kategori baik sebesar 67%-100%

Cukup Baik : Apabila setiap indicator dari Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir jawaban responden berada pada kategori Cukup Baik sebesar 34%-66%

Tidak Baik : Apabila setiap indicator dari Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir jawaban responden berada pada kategori Kurang Baik sebesar 1%-33%

2. Transpormasi Kemampuan

Baik : Apabila setiap indicator dari Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir dilaksanakan atau jawaban responden berada pada kategori terlaksana sebesar 67%-100%

Cukup Baik : Apabila setiap indicator dari Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir jawaban responden berada pada kategori Cukup Baik sebesar 34%-66%

Tidak Baik : Apabila setiap indicator dari Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir jawaban responden berada pada kategori Kurang Baik sebesar 1%-33%

3. Peningkatan Kemampuan

Baik : Apabila setiap indicator dari Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir dilaksanakan atau jawaban responden berada pada kategori Baik sebesar 67%-100%

Cukup Baik : Apabila setiap indicator dari Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir jawaban responden berada pada kategori Cukup Baik sebesar 34%-66%

Tidak Baik : Apabila setiap indicator dari Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir jawaban responden berada pada kategori Kurang Baik sebesar 1%-33%

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan bertujuan tertentu , Menurut (Resseffendi 2010) mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Melalui penelitian deskriptif penelitian akan memaparkan yang sebenarnya terjadi mengenai keadaan yang sedang diteliti, Sugiyono (2017) mengatakan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan ciri-ciri ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam pendekatan Kuantitatif.

Untuk pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif , seperti yang dikemukakan sugiyono (2017:8) bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif. Pendekatan Kuantitatif ini digunakan oleh peneliti untuk mengukur Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Lokasi penelitian sengaja diambil di Desa Tenganau. Alasannya karena :

1. Kurangnya edukasi pengelola (UED-SP) kepada Masyarakat mengenai fungsi UED-SP untuk memberdayakan
2. Masih banyak jumlah pemanfaat (UED-SP) yang melakukan penunggakan

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

(Sugiyono 2018:80) mengatakan populasi adalah wilayah generasi yang terdiri dari atas subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lalu kemudian ditarik kesimpulannya.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2018 ; 131) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Didalam menentukan sampel diperlukan sebuah metode pengambilan sampel yang tepat agar diperoleh sampel yang mewakili.

Dalam menentukan jumlah sampel masyarakat desa tengganau menggunakan Rumus Slovin yaitu sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = jumlah sampel

N = jumlah seluruh populasi

e = tingkat kesalahan sampel (sampling error), 20 %

$$n = \frac{157}{1 + 157(20)^2}$$

$$n = \frac{157}{1 + 157(0,2)^2}$$

$$n = \frac{157}{1 + 157(0,02)}$$

$$n = \frac{157}{1 + 1,57}$$

$$n = \frac{157}{1 + 4}$$

$$n = \frac{157}{5}$$

$$n = 31,4$$

$$n = 31$$

Tabel III.1 Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

No	Unit Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Komisaris BUMDES	1	1	100%
2	Ketua Pengelola UED-SP	1	1	100%
3	Tata Usaha UED-SP	1	1	100%
4	Masyarakat Pemanfaat UED-SP	157	31	20%
Jumlah		160	34	-

Sumber : Modifikasi Penulis,2020

Dari hitungan jumlah populasi sebanyak 157 orang pada Usaha Ekonomi Desa – simpan Pinjam (UED- SP) di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dengan kelonggaran 20% maka hasil perhitungan dengan menggunakan slovin didapati sampel sebanyak 36 orang yang menjadi responden penelitian.

Adapun teknik penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sampel sebagai berikut :

D. Teknik Penarikan Sampel

Menurut sugiyono (2017:81) menjelaskan bahwa teknik pengambilan sampel adalah untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat teknik sampling yang digunakan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik Random Sampling, random sampling adalah pengambilan anggota sampel dari pemanfaat Usaha Ekonomi Desa- Simpan Pinjam yang dilakukan secara acak.

E. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang baik, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber data yang diperoleh dilokasi penelitian. Adapun data yang diperoleh secara langsung dalam hal ini adalah Pemberdayaan masyarakat melalui program Usaha Ekonomi Desa-Simpan pinjam, dan Masyarakat yang berkaitan peminjaman modal Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam.

b. Data Skunder

Data yang diperoleh oleh peneliti adalah metode data yang diperoleh dari yang berhubungan dengan penelitian. Data-Data ini berupa :

- a. Peraturan Bupati Bengkalis No 52 tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD)

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 06 Tahun 1998 Tentang UED-SP
- c. Laporan Perkembangan Pinjaman Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP)
- d. Struktur Organisasi (UED-SP)

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018;6) Teknik pengumpulan data merupakan ;Langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari peneliti adalah mendapatkan data. Untuk mendapatkan data pada penelitian ini, penulis menggunakan cara berikut :

a. Observasi

Teknik penyelidikan yang dijalankan secara sistematis pengumpulan data factual terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian,dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek studi yang telah ditentukan. Observasi digunakan untuk melihat bagaimana pelaksanaan Program Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

b. Kuesioner

Kuesioner adalah salah satu cara yang dilakukan untuk pengambilan data dengan menyebarkan kuesioner terhadap responden yang telah ditentukan dalam penelitian. Kuesioner terdiri dari pertanyaan-

pertanyaan yang disusun untuk mendapatkan data berupa tanggapan responden mengenai permasalahan yang diteliti

c. Wawancara

Dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden yang mengacu pada pedoman data yang diperlukan dalam penelitian, yaitu pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam

d. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2018;329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk pengumpulan data kemudian ditelaah.

G. Teknik Analisis Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, selanjutnya data dikelompokkan dan diolah menurut jenisnya yang hasilnya disajikan dalam bentuk tabel, angka, presentase, dan dilengkapi dengan uraian keterangan yang mendukung, kemudian di analisis dengan metode deskriptif kuantitatif menggambarkan data yang terkumpul secara menyeluruh tentang suatu keadaan yang terjadi pada objek penelitian yang mana data suatu Analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta lapangan untuk kemudian mengambil kesimpulan serta disajikan dalam bentuk penelitian secara ilmiah.

BAB IV

DESKRIPSI LOKALSI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Tenganau

Desa Tenganau adalah salah satu dari total 26 desa yang terdapat di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Desa ini mulai berdiri sejak 1978, hingga saat ini memiliki luas 20 km² dengan jumlah penduduk 3.345 jiwa terdiri dari 1.998 penduduk laki-laki, 1.646 dan penduduk perempuan 1.699. Adapun jumlah KK 1.014 terbagi dari 12 dusun mencakup 34 RT dan 15 RW.

Desa Tenganau adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Desa Bantan Tengah merupakan pemekaran dari Desa Balai Punggut, dikarenakan desa Balai Punggut luas terlalu luas dan kondisi desanya jauh maka pengulu desa Balai Punggut menunjuk salah satu tokoh masyarakat untuk dijadikan sebagai wakil penghulu di desa Tenganau. Kini desa Tenganau dibagi menjadi 2 desa yaitu desa Tenganau dan Desa Balai Punggut. Pada Tahun 1978 pemerintahan menjadikan desa Tenganau.

B. Gambaran Umum Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP)

Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) terletak di JL. Mahadi Desa Tenganau. Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) ini didirikan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 tentang pendirian Bumdesa dan juga Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 71 Tahun 2017 tentang pedoman penyertaan Modal Desa ke Bumdesa yang Berasal Dari Dana Usaha Ekonomi Desa.

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh bagian dari Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang bersal dari kekayaan yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan ushaa lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pengelolaan Ued ini perlu diadakan pembinaan dan pengendalian agar supaa dana usaha Desa sebagai asset bagi masyarakat Desa dpaat terus diekmbangkan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan, serta untuk memantau dan mengendalikan agar pelaksanaan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dan mekanisme yang telah dimanfaatkan Dana Usaha Desa tersebut akan dijadikan modal kerja bagi UED, yang akan disalurkan bergulir kepada masyarakat miskin dalam rangka bantuan permodalan dalam kegiatan ekonomi produktifnya, Penyaluran ini dilakukan dengan cara pemberian pinjmaan yang harus dikembalikan melalui pengelola UED dengan tingkat suku bunga tertentu dengan waktu tertentu.

Adapun tujuan didirikan Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) yaitu :

1. Membantu permodalan usaha masyarakat desa
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan upaya pengentasan kemiskinan
3. Mengurangi ketergantungan masyarakat dari rentenir
4. Meingkatkan kebiasaan menabung masyarakat desa
5. Meningkatkan pendpatan asli daerah

C. Susunan Pengurus Unit Simpan Pinjam (UED-SP)

Dalam pelaksanaan operasional maka Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) desa Tenganau didukung oleh pengurus yaitu:

Tabel IV.1. Daftar Susunan Pengurus Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Tahun 2019

No	Jabatan	Nama
1	Komisaris BUMDesa	Evi Siswati
2	Direktur BUMDesa	Taufiq
3	Pengawas BUMDesa - BPD - Inspektorat Kabupaten Bengkalis - Ketua - Wakil - Sekretaris	- Samsul Habidin - Modestina Marbun, S.kom
4	Pembantu Pelaksana Operasional	Desa
5	Ketua Unit USP	Eka Sundari, S.Pd.I
6	Kasir Unit USP	Shinta Nilam Putri, A.md
7	Tata Usaha Unit USP	Merry Handayani, S.Si
8	SAK Unit USP	Alex Tison Ambarita
9	Staf pembantu	-

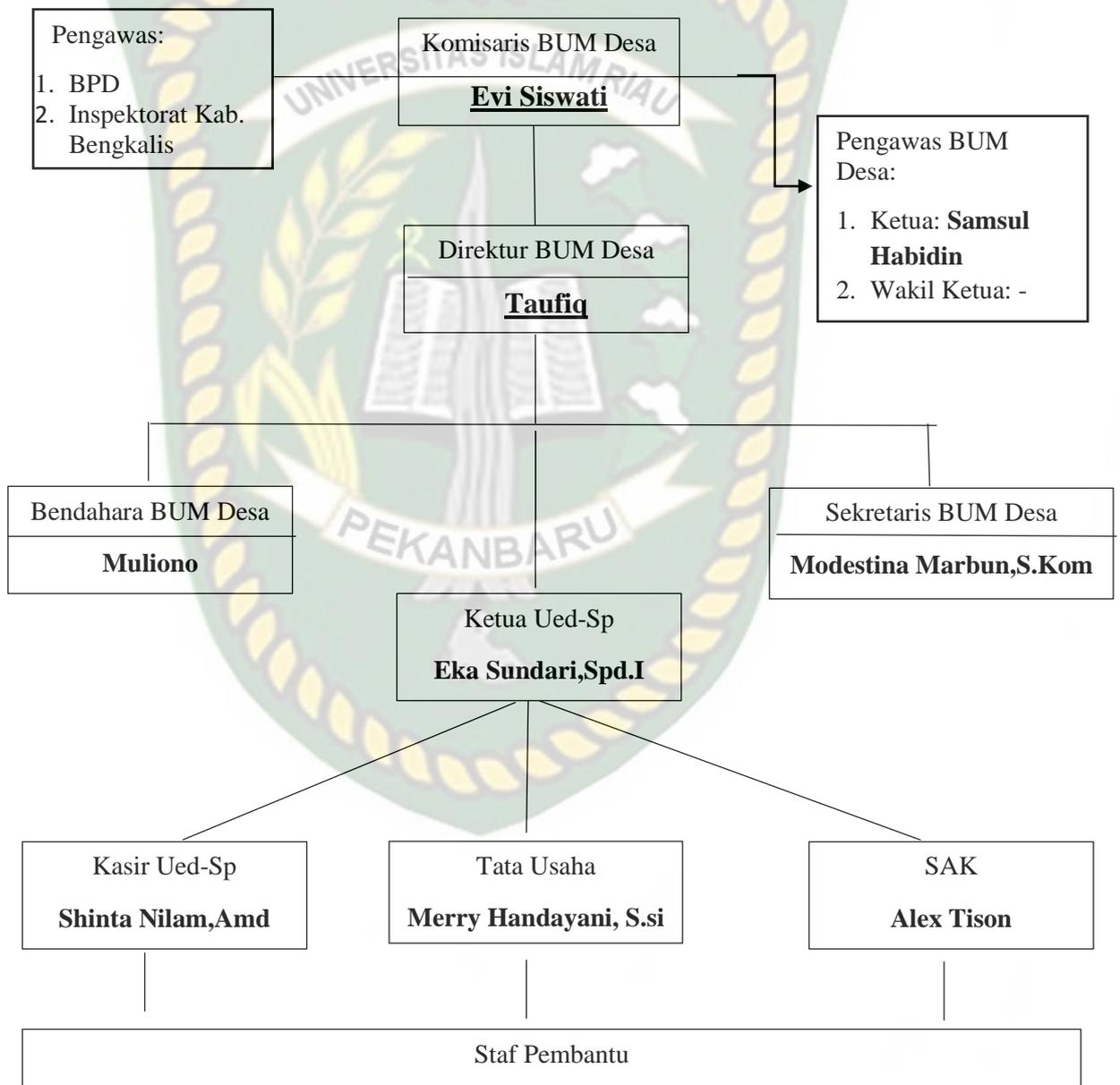
Sumber: Dokumentasi Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP)

2019

D. Stuktur Organisasi Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Tenganau

Dari seluruh pengurus tersebut maka susunanya dapat dilihat pada gambar stuktur organisasi dibawah ini.

Gambar IV.1 Stuktur Organisasi Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Tenganau



Sumber: Dokumentasi Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) 2019

E. Tupoksi Jabatan Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP)

Berdasarkan gambar tersebut, maka dapat dilihat tupoksi masing-masing tugas setiap jabatan yang tercantum di Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) yaitu:

1. Komisaris Bumdes
 - a. Berkewajiban memberikan nasehat kepada direktur dalam melaksanakan pengelolaan Bumdesa.
 - b. Berkewajiban memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Bumdesa
 - c. Berkewajiban mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Bumdesa
 - d. Berwenang meminta penjelasan dari direktur mengenai persoalan yang menyangkut mengelola usaha ekonomi desa
 - e. Berwenang melindungi usaha ekonomi terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja bumdesa
 - f. Berwenang menunjuk seseorang atau beberapa orang yang dianggap ahli untuk melakukan audit terhadap kinerja apabila dianggap perlu
2. Direktur Bumdesa

- a. Berkewajiban mengelola dan mengembangkan bumddesa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan atau pelayanan umum masyarakat desa.
- b. Berkewajiban menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa
- c. Berkewajiban melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya
- d. Berkewajiban memimpin dan mengendalikan semua kegiatan-kegiatan bumdesa
- e. Berkewajiban menyiapkan rencana kerja dan rencana bisnis kepada komisaris setiap bulan
- f. Berkewajiban menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan bumdes
- g. Berwenang membuat laporan perkembangan seluruh kegiatan unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan
- h. Berwenang memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha jasa kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.
- i. Berwenang menyampaikan laporan pertanggung jawaban 9 LPJ Desa tahunan melalui musyawarah desa selambat-lambatnya 3 tahun setelah Tutup buku tahunan

3. Sekretaris Bumdesa

- a. Berkewajiabn menyelenggarakan administrasi umum bumdesa

- b. Melakukan verifikasi perkembangan usaha-usaha Bumdesa
- c. Membantu tugas-tugas direktur dalam bidang admintasi umu Bumdesa
- d. Membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan perkembangan dta perkembangan Bumdesa

4. Bendahara Bumdesa

- a. Berkewajiban menyelenggrakan keuangan Bumdesa
- b. melakukan verifikasi laporan keuangan usaha usaha Bumdesa
- c. Membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan data dan perkembangan Bumdesa
- d. Membantu tugas-tugas Direktur dalam bidang keuangan Bumdes

5. Kepala Usaha Ekonomi Desa

- a. Memimpin kepengurusan usaha ekonmi desa
- b. Melaksanakan rapat usaha ekonomi desa simpan pinjam setiap bulannya.
- c. Memastikan kelengkpaan dokumen pencairan dana yang telah ditetapkan
- d. Membuat kebijakan internal yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku

- e. Mengusulkan kebutuhan karyawan tambah kepada direktur dan komisaris
- f. Mengoreksi dan menyampaikan laporan kepada direktur

6. Tata Usaha (UED-SP)

- g. Membuat Profil UED
- h. Menerima dan memverifikasi administrasi proposal permohonan pinjaman peminfaat
- i. Menyiapkan kelengkapan dokumen pencairan dana
- j. Membuat buku bio data peminfaat dan UED
- k. Melakukan pengarsipan dan dokumentasi seluruh administrasi UED
- l. Mendatangi dokumen dokumen yang telah ditetapkan

7. Kasir UED

- i. Menerima, menyimpan, membayarkan uang berdasarkan bukti administrasi keuangan yang sah
- j. Membuat kas harian secara manual, buku monitoring , pinjaman manfaat, kartu bukti pembayaran angsuran peminfaat
- k. Melaksanakan pembukuan administrasi keuangan simpan pinjam
- l. Membuat dan melaporkan keuangan unit usaha ekonomi simpan pinjam kepada kepala usaha ekono desa simpan pinjam setiap akhir bulan
- m. Menyetorkan uang kas ke rekening UED dan rekening tabungan masyarakat, dengan ketentuan yang kas ditangan kasir pada saat

tutup buku laporan pencatatan keuangan akhir bulan maksimal 3.000.000 (tiga juta rupiah)

- n. Mengeluarkan surat keterangan yang menerangkan secara jelas kondisi uang kas jika uang kas saat tutup buku laporan pencatatan akhir bulan melebihi maksimal 3.000.000
- o. Mengeluarkan surat kuasa penagihan dan penerimaan angsuran pemabayaran pemanfaat menunggak atas persetujuan ketua UED
- p. Mendatangi dokumen-dokumen yang telah dimanfaatkan

8. Staf Analisi Kredit

- f. Melakukan penilaian kelayakan usaha yang telah diusulan calon pemanfaat.
- g. Mengeluarkan rekomendasi besaran pinjaman calon pemanfaat
- h. Menyampaikan hasil penilaian kelayakan usaha dan rekomendasi besaran pinjaman kepada peserta vertifikasi akhir
- i. Melakukan penilaian terhadap pemanfaat yang berhasil dalam mengembangkan usaha
- j. Mendatangi dokumen-dokumen yang telah ditetapkan

9. Staf Pembantu

- d. Melakukan tugas-tugas pelayan umum
- e. Membantu melaksanakan tugas-tugas teknis lapangan
- f. Tugas sebagaimana 1 dan 2 dijabarkan lebih lanjut dalam surat keputusan pengangkatan Staf Pembantu

10. Pengawas UED-SP

- e. Pengawas berkewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja UED sekurang-kurangnya 1 tahun sekali
- f. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja direktur
- h. Mendatangi dokumen-dokumen yang telah ditetapkan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Sebelum dibahas penelitian ini lebih jauh dalam mengetahui pelaksanaan program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, maka perlu kiranya untuk dibahas mengenai identitas para responden yang berjumlah 3 orang, terdiri dari Komisaris Bumdes 1 orang, Ketua UED-SP 1 orang, Kepala TU UED-SP 1 orang, dan 31 orang masyarakat pemanfaat UED-SP dengan rincian sebagai berikut :

1. Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin pada identitas responden terdiri dari dua jenis kelamin yaitu perempuan dan laki-laki responden dan hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel V.1 berikut ini :

Tabel V.1 Identitas Distribusi Jumlah Responden Di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Orang	Persentase (%)
1.	- Laki-laki	20	65%

2.	- Perempuan	11	35%
Jumlah		31	100%

Sumber: Data Olahan,2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin responden Sebagian besar adalah laki-laki, dengan jumlah 21 orang (65%) sedangkan sisanya perempuan dengan jumlah orang 11 (35%).

2. Tingkat Usia Responden

Data usia responden dan hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel V.2 berikut ini:

Tabel V.2 Identitas Distribusi Jumlah Responden Di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Usia

No	Usia (Tahun)	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	20-25	3	10%
2	26-30	7	22%
3	31-35	6	19%
4	36-40	8	26%
5	41-45	4	13%
6	≥46	3	10%
Jumlah		31	100%

Sumber : Data Olahan 2021

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Sebagian besar responden berusia 20-25 dengan jumlah 3 orang (10%). Berusia 26-30 tahun berjumlah 7 orang (22%),berusia 31-35 tahun berjumlah 6 orang (19%), berusia 36-40 tahun berjumlah 8 orang (26%),berusia 41-45 tahun berjumlah 4 orang (13%) dan berusia ≥46 tahun berjumlah 3 orang (10%).

3. Pendidikan Responden

Analisis ketiga dilakukan terhadap data Pendidikan dan hasil analisisnya dapat dilihat dari tabel V.3 sebagai berikut ini:

Tabel V.3 Identitas Distribusi Jumlah Responden Di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	SD	2	6%
2	SMP	6	19%
3	SMA	16	52%
4	Diploma	3	10%
5	Sarjana	4	13%
Jumlah		31	100%

Sumber : Data Olahan 2021

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat Pendidikan responden yang terbanyak adalah SMA dengan jumlah 16 orang (52%), tamatan SD 2 orang (6%), tamatan SMP 6 orang (19%), tamatan Diploma 3 orang (10%), dan Sarjana 4 orang (13%).

B. Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

Pada Bab ini akan dijabarkan hasil penelitian tentang Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabuapten Bengkalis. berdasarkan penyebaran kuesioner berjumlah 13 item yang disebarakan ke 31 orang masyarakat pemanfaat UED-SP hasilnya sebagai berikut:

1. Indikator Penysadaran dan Pembentukan Prilaku

Menurut Ambar Teguh Sulistiyani (2017:83) penyadaran dan pembentukan prilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat, pada tahap ini pihak pemberdaya.aktor/pelaku berusaha menciptakan pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya pemberdayaan yang efektif.

Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat itu, dan dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

a. Pendanaan

Pendanaan adalah salah satu upaya yang dilakukan UED-SP untuk membantu warga mendapatkan akses dengan cara mudah dan bunga yang rendah. Selain itu juga untuk mendorong produktivitas usaha milik masyarakat,pendanaan berkaitan dengan kejelasan pemberian informasi tentang setiap jenis usaha penggunaan dana yang ditawarkan kepada masyarakat dan juga proses mengedukasi masyarakat atas alur proses dan prosedur pendanaan. Berdasarkan hasil jawaban kuiseioner terhadap pendanaan menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel V.4 : Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Pendanaan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha

**Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Tenganau
Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis**

No	Item Pertanyaan	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	Jumlah
1.	Kejelasan pemberian informasi setiap jenis usaha penggunaan dana program yang ditawarkan kepada masyarakat	11 (35,4%)	20 (64,6%)	0 (0,0%)	31 (100%)
2.	Edukasi yang diberikan petugas terkait segala proses dan prosedur pendanaan	13 (42%)	18 (58%)	0 (0,0%)	31 (100%)
Rata-Rata		12	19	0	31
Persentase		(38,7%)	(61,3%)	(0,0%)	(100%)
Kategori		Cukup Baik			

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden berjumlah 31 orang, kemudian untuk item pertanyaan pertama, mengenai kejelasan pemberian informasi setiap jenis usaha penggunaan dana program yang ditawarkan kepada masyarakat dapat dilihat bahwa sebanyak 11 orang (35,4%) menjawab baik, 20 orang (64,6%) menjawab cukup baik, dan tidak ada yang menjawab tidak baik.

Untuk item pertanyaan kedua, mengenai edukasi yang diberikan petugas terkait segala proses dan prosedur pendanaan sebanyak 13 orang (42%) menjawab baik, 18 orang (58%) menjawab cukup baik, dan tidak ada yang menjawab kurang baik.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa sub indikator pendanaan mendapatkan rata-rata jawaban baik 12 orang (38,7%), mendapatkan rata-rata jawaban cukup baik dengan jumlah 19 orang (61,3%), dan rata-rata jawaban tidak baik tidak ada (0,0%). Persentase 61,3% terletak pada interval 34-66% sehingga tergolong **“Cukup Baik”**. Ini dibuktikan dengan hasil kuesioner penulis pada tanggapan responden terhadap Pendaanan.

Berdasarkan hasil wawanacara dengan Evi Siswati selaku Komisaris Bumdes terkait tujuan pendanaan program UED-SP diperoleh informasi sebagai berikut:

“Jelas tujuannya untuk membantu perekonomian masyarakat dengan adanya program ini melalui sistem simpan pinjam. Jadi sudah menjadi bantuan modal terutama UMKM” (Wawancara Evi Siswati, Selaku Komisaris Bumdes tanggal 5 April 2021).

Sejalan denagan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban Eka Sundari selaku Ketua UED-SP sebagai berikut;

“Tentu untuk penyampain informasi pendanaan tujuannya jelas yaitu secara garis besar membantu perekonomian masyarakat, tujuannya agar tidak harus ke bank karena banyak yang kebingungan dan takut dengan bunga yang besar”.(Wawancara Eka Sundari selaku Ketua UED-SP, tanggal 5 April 2021)

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban Mery selaku Kepala Tata Usaha UED-SP terkait edukasi terkait prosedur dan ketentuan membayar kepada masyarakat sebagai berikut:

“Jadi, sebelum mereka meminjam kita berikan edukasi terkait jenis usaha, besar pinjaman, angunan, prosedur dan ketentuan pembayaran serta bunganya juga dijelaskan dari awal beserta tenor pembayaran.” (Wawancara Mery, Kepala Tata Usaha UED-SP, tanggal 5 April 2021)

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam hal pendanaan ditujukan untuk membantu perekonomian masyarakat agar lebih meningkat. Dalam proses pendanaan sudah dilakukan edukasi secara menyeluruh terkait jenis usaha pinjaman, besar pinjaman yang disesuaikan dengan angunan, sistem prosedur pinjaman, ketentuan pembayaran, besar bunga dan juga tenor yang disesuaikan dengan kemampuan membayar cicilan masyarakat.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator penyadaran dan pembentukan perilaku peneliti melihat bahwa belum sepenuhnya memberikan informasi yang jelas terkait penggunaan dana dan juga edukasi yang diberikan petugas kurang merata terkait program dana perimbangan, perkebunan, perikanan, peternakan, industri kecil dan jasa .

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuesioner, hasil wawancara dengan Komisaris Bumdes, Ketua UED-SP, dan Kepala Tata Usaha, dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator penyadaran dan pembentukan perilaku dalam penelitian Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa

Tengganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis berada pada kategori “Cukup Baik” dengan jumlah Persentase 61,3%.

b. Pembangunan sistem

Pembangunan sistem dapat diartikan Menyusun sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang ada. Ketidakterbacaan dalam sistem SOP yang lama menyebabkan sistem tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan sehingga dapat disusun SOP yang baru.

Pembangunan sistem ini berkaitan dengan pembangunan sistem pinjaman dana dari program UED-SP dan tingkat pemahaman masyarakat terkait SOP pinjaman dana dari program UED-SP. Berdasarkan hasil kuesioner terhadap pembangunan sistem menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel V.5 : Distribusi Tanggapan Responden Terkait Indikator Pembangunan Sistem Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Tengganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

No	Item Pertanyaan	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	Jumlah
1.	Pembangunan sisten pinjaman dana dari program UED-SP	13 (42%)	16 (51,6%)	2 (6,4%)	31 (100%)

2.	Tingkat pemahaman masyarakat terkait SOP pinjaman dana dari ptoqram UED-SP	12 (38,8%)	18 (58%)	1 (3,2%)	31 (100%)
Rata-Rata		12	17	2	31
Persentase		(38,8%)	(54,8%)	(6,4%)	(100%)
Kategori		Cukup Baik			

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden berjumlah 31 orang, kemudian untuk item pertanyaan mengenai pembangunan sistem pinjaman dana dari program UED-SP dapat dilihat bahwa sebanyak 13 responden (42%) menjawab baik, 16 responden (51,6%) menjawab cukup baik, dan 2 responden (6,4%) menjawab Tidak baik.

Untuk item pertanyaan kedua mengenai tingkat pemahaman masyarakat terkait SOP pinjaman dana dari program UED-SP sebanyak 12 responden (38,8%) menjawab baik, 18 responden (58%) menjawab cukup baik, dan 1 responden (3,2%) menjawab Tidak baik.

Dari data diatas disimpulkan bahwa sub indikator pembangunan sistem mendapatkan rata-rata jawaban baik 12 orang (38,8%), mendapatkan rata-rata jawaban cukup baik 17 orang (54,8%) dan 2 orang (6,4%) mendapatkan rata-rata jawaban Tidak baik. Persentase 54,8% terletak pada interval 34%-66% sehingga tergolong **“Cukup Baik”**. Ini dibuktikan dengan hasil kuesioner penullis pada tanggapan responden terhadap pembangunan sistem..

Berdasarkan hasil wawancara Evi Siswati selaku Komisaris Bumdes terkait efektifitas pembangunan sistem yang ditunjukkan petugas program UED-SP diperoleh informasi sebagai berikut:

“ Saya rasa sudah efektif karena memang semuanya sudah dibina dan bahkan sudah ada pendampingnya dari kabupaten.” (Wawancara Evi Siswati selaku Komisaris Bumdes, tanggal 5 April 2021)

Sejalan dengan hasil wawancara di atas juga didukung dengan jawaban Eka Sundari selaku Ketua UED-SP sebagai berikut:

“Sudah, kami pernah mendapatkan pembinaan dari pendamping desa bagian ekonomi, jadi intinya kita tetap mendapatkan pembinaan agar proses menjalankan bumdes bisa berjalan efektif.” (Wawancara Eka Sundari selaku Ketua UED-SP, tanggal 5 April 2021)

Selain dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban Mery Selaku Kepala Tata Usaha UED-SP sebagai berikut :

“Untuk pembangunan sistem jelas sudah ada SOP nya, tugas-tugas kami juga sudah diuraikan dengan jelas dalam struktur organisasi jadi ya harus semaksimal mungkin.”(Wawancara Mery selaku Kepala Tata Usaha UED-SP, tanggal 5 April 2021)

Menarik kesimpulan dari hasil wawncar di atas, maka bahwa pembangunan sistem yang dijalankan sudah efektif karena adanya pembinaan khusus dari Kabupaten dan pendamping desa bagian ekonomi dalam memberikan sosialisasi terkait upaya meningkatkan potensi ekonomi masyarakat perdesaan.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator pembangunan sistem peneliti melihat bahwa pembangunan sistem masih sulit

dipahami oleh masyarakat karena masih banyak yang tidak memahami SOP pinjaman dana dari program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuesioner, hasil wawancara dengan Komisaris Bumdes, Ketua UED-SP, dan Kepala Tata Usaha, dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator pembangunan sistem dalam penelitian Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) berada pada kategori **“Cukup Baik”** dengan jumlah persentase 54,8%

2. Indikator Transformasi Kemampuan

Menurut Ambar Teguh (2017;83) transformasi kemampuan ialah pengetahuan dan kecakapan-keterampilan dapat berlangsung baik penuh semangat dan berjalan efektif jika tahap pertama sudah terkondisikan. Masyarakat akan menjalankan proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut keadaan ini akan menstimulasi keterbukaan wawasan dan menguasai keterampilan dasar mereka butuhkan.

a. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan Program berkaitan dengan dampak bantuan ekonomi yang dirasakan masyarakat setelah mendapatkan program pinjaman dana dari UED-SP, bagaimana usaha yang dijalankan dan peninjauan dari pengelola UED-SP. Berdasarkan hasil jawaban kuesioner terhadap pelaksanaan program sebagai berikut :

Tabel V.6 : Distribusi Tanggapan Responden Terkait Indikator Pelaksanaan Program Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Tenggau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

No	Item pertanyaan	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	Jumlah
1.	Dampak bantuan ekonomi yang dirasakan masyarakat setelah mendapatkan program pinjaman dana	20 (64,6%)	11 (35,4%)	0 (0,0%)	31 (100%)
2.	Usaha yang sedang dijalankan oleh pemanfaat UED-SP	15 (48,4%)	16 (51,6%)	0 (0,0%)	31 (100%)
	Peninjauan dari pihak pengelola UED-SP ke tempatt Usaha pemanfaat UED-SP	0 (0,0%)	11 (35,4%)	20 (64,6%)	31 (100%)
	Rata-rata	11	14	6	31
	Persentase	(35,4%)	(45,2%)	(19,3%)	(100%)
	Kategori	Cukup Baik			

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden berjumlah 31 orang, kemudian untuk item pertanyaan mengenai dampak bantuan ekonomi yang

dirasakan masyarakat setelah mendapatkan program pinjaman dana sebanyak 20 responden (64,6%) menjawab baik, 11 responden (35,4%) menjawab cukup baik, dan tidak ada satupun menjawab Tidak baik, selanjutnya pada usaha yang sedang dijalankan oleh pemanfaat sebanyak 15 responden (48,4%) menjawab baik, sebanyak 16 responden (51,6%) menjawab cukup baik dan tidak ada satupun yang menjawab kurang baik.

Untuk item pertanyaan kedua mengenai peninjauan dari pihak pengelola UED-SP ke tempat usaha pemanfaat UED-SP tidak ada satupun yang menjawab baik (0,0%), sebanyak 11 responden (35,4%) menjawab cukup baik, dan sebanyak 20 responden (64,6%) menjawab Tidak baik.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa sub indikator pelaksanaan mendapatkan rata-rata jawaban baik sebanyak 11 responden (35,4%) mendapatkan rata-rata jawaban cukup baik sebanyak 14 responden (45,2%), dan mendapatkan rata-rata jawaban kurang baik sebanyak 6 responden (19,3%). Persentase 45,2% terletak pada interval 34%-66% sehingga tergolong **“Cukup Baik”**. Ini dibuktikan dengan hasil kuesioner penullis pada tanggapan responden terhadap pelaksanaan program

Berdasarkan hasil wawancara dengan Evi Siswati selaku Komisaris Bumdes terkait pelaksanaan program dapat diperoleh informasi sebagai berikut:

“bermanfaat itu tentu selama tujuannya untuk membantu kegiatan ekonomi kan banyak jenis usaha yang ditawarkan mulai dari perdagangan, perkebunan, perikanan, industry kecil, dan jasa. Kalau untuk Peninjauan itu hanya dilakukan saat pemanfaat menunggak, maka Ketua UED-SP dan staf yang lain mengunjungi ketempat usahanya.” (Wawancara 5 April 2021).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban Eka Sundry selaku Ketua UED-SP diperoleh informasi sebagai berikut

“Ada kok, peninjauan ke tempat usaha mereka tetapi kami hanya mengunjunginya jika menunggak dan kunjungan juga dilakukan awal meminjam.” (Wawancara 5 April 2021).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diperoleh bahwa kunjungan ke tempat usaha pemanfaat UED-SP hanya dilakukan jika pemanfaat menunggak saja, seharusnya ada tinjauan agar petugas ued-sp mengetahui dana digunakan untuk kebutuhan usaha atau untuk kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan hasil observasi peneliti lakukan mengenai indikator pelaksanaan program peneliti melihat bahwa meskipun sudah mampu memberikan dampak bantuan ekonomi terhadap masyarakat , akan tetapi banyak pemanfaat menyalahgunakan pinjaman dana untk kebutuhan sehari-hari karena tidak adanya tinjauan dari petugas ued-sp ketempat usaha.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuesioner, hasil wawancara dengan Komisaris Bumdes, Ketua Ued-sp, dan Kepala Tata Usaha, dan observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator pelaksanaan program berada pada kategori **“Cukup Baik”** dengan jumlah persentase 45,2%.

b. Dapat dipertanggungjawabkan

Dalam pelaksanaan UED-SP pada dasarnya harus memiliki informasi pokok pertanggungjawabkan. Hal ini mulai dari jaminan yang diberikan dan

pertanggungjawaban masyarakat dalam membayar angsurn sesuai tempo. Dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap untuk menjaga dokumen anggunan yang dijadikan jaminan dan tingkat pertanggungjawaban dalam membayar angsuran sesuai tempo. Berdasarkan hasil jawaban kuesioner terhadap pertanggungjawaban menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel V.7 : Distribusi Tanggapan Responden Terkait Indikator Dapat Dipertanggungjawabkan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

No	Item Pertanyaan	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	Jumlah
1.	Tingkat pertanggungjawaban masyarakat dalam membayar angsuran sesuai tempo perjanjian	15 (48,4%)	14 (45,2%)	2 (6,4%)	31 (100%)
2.	Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap UED-SP untuk menjaga dokumen yang dijadikan jaminan	11 (35,4%)	18 (58,2%)	2 (6,4%)	31 (100%)
	Rata-rata	13	16	2	31
	Persentase	(42%)	(51,6%)	(6,4%)	(100%)
	Kategori	Cukup Baik			

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden berjumlah 31 orang, kemudian item pertanyaan pertama mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dokumen anggunan yang dijadikan jaminan sebanyak 11 responden (35,4%) menjawab baik, sebanyak 18 responden (58,2%) menjawab cukup baik, dan sebanyak 2 responden (6,4%) menjawab tidak baik.

Untuk item pertanyaan kedua mengenai tingkat tanggungjawab masyarakat dalam membayar angsuran sesuai tempo dalam perjanjian sebanyak 15 responden (48,4%) menjawab baik, sebanyak 14 responden (45,2%) menjawab cukup baik, dan 2 (6,4%) responden menjawab Tidak baik.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa sub indikator dapat dipertanggungjawabkan mendapatkan rata-rata jawaban baik dengan jumlah 13 responden (42%), mendapatkan rata-rata jawaban cukup baik dengan jumlah 16 responden (51,6%), dan mendapatkan rata-rata jawaban kurang baik dengan jumlah 2 responden (6,4%). Persentase 51,6% terletak pada interval 34%-66% sehingga tergolong **“Cukup Baik”**. Ini dibuktikan dengan hasil kuesioner penullis pada tanggapan responden terhadap dapat dipertanggungjawabkan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Evi siswati selaku Komisaris Bumdes terkait kepercayaan masyarakat terkait dokumen yang dijadikan jaminan diperoleh informasi sebagai berikut:

“Sampai saat ini yang mengelola UED-SP sudah kredibel dan bertanggungjawab karena kalau kita bicara di Bank yang manajemennya bagus saja tunggakan pasti ada, bahkan kalau di UED-SP ini ada tunggakan juga, yang jelas untuk menanggulangnya yang dilakukan pertama secara kekeluargaan.” (Wawancara, tanggal 5 April 2021).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban Eka Sundry selaku Ketua UED-SP informasi yang diperoleh sebagai berikut:

“Kalau seperti tunggakan memang hal yang biasa. Kami mendatangi para nasabah dengan cara kekeluargaan jadi bukan seperti debt collector yang kesana tujuannya cumin nagih, jadi ya ibaratnya cumin silatuhrami sambal menanyakan hal tersebut.” (Wawancara 5 April 2021)

Sejalan dengan hasil wawancara di atas juga didukung dengan jawban Mery selaku Kepala Tata Usaha diperoleh informasi sebagai berikut:

“Untuk yang menunggak memang akhir-akhir ini jumlahnya semakin meningkat karena Covid-19 ini juga, cumin gakda covid pun dari dulu memang ada juga yang menunggak, kita maklum. Padahal kalau track record masyarakat bagus kita bisa menaikkan jumlah pinjaman lebih besar dari sebelumnya.” (Wawancara 5 April 2021)

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa petugas UED-SP termasuk orang yang bertanggungjawab. Namun memang dalam membangun kesadaran masyarakat atas ketepatan pembayaran angsuran sesuai tempo masih belum maksimal, karena memang dari pihak UED-SP mengutamakan sistem kekeluargaan dalam membangun manajemen bagian tunggakan cicilan pemanfaat atau nasabah yang macet.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator dapat dipertanggungjawabkan peneliti melihat bahwa Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis terkait tanggungjawab dalam membayar angsuran dengan tempo dijanjikan dan kepercayaan masyarakat terkait dokumen sebagai jaminan masih belum optimal.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuesioner, hasil wawancara dengan Komisaris Bumdes, Ketua Ued-sp, Kepala Tata Usaha Ued-sp, dan hasil observasi peneliti dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa indikator dapat dipertanggungjawabkan dalam penelitian Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis berada pada kategori “**Cukup Baik**” dengan jumlah persentase 51,6%.

3. Indikator Tingkat Kemampuan

Menurut Ambar Teguh (2017;84) Tingkat Kemampuan ialah tahap peningkatan intelektualitas dan kecakapan kerampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan dapat membentuk kemampuan masyarakat di dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan. Dalam konsep pembangunan masyarakat pada kondisi seperti ini seringkali didudukkan sebagai sunjek pembangunan atau pemeran utama .

a. Kompetensi Petugas UED-SP

Kompetensi Petugas program UED-SP berkaitan dengan Pendidikan para petugas yang bekerja di UED-SP di Desa Tenganau dan juga pengalaman kerja para petugas UED-SP. Berdasarkan hasil jawaban kuesioner terhadap kompetensi petugas program UED-SP menunjukan hasil sebagai berikut :

Tabel V.8 : Distribusi Tanggapan Responden Terkait Indikaor Kompetensi Petugas UED-SP Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

No	Item Pertanyaan	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	Jumlah
1.	Pendidikan para petugas yang bekerja di UED-SP	18 (58,1%)	13 (41,9%)	0 (0,0%)	31 (100%)
2.	Pengalaman kerja para petugas di UED-SP	11 (35,5%)	19 (61,3%)	1 (3,2%)	31 (100%)
	Rata-rata	14	16	1	31
	Persentase	(45,2%)	(51,6%)	(3,2%)	(100%)
	Kategori	Cukup Baik			

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden berjumlah 31 orang, kemudian item pertanyaan pertama mengenai Pendidikan para petugas UED-SP sebanyak 18 responden (58,1%) menjawab baik, 13 responden (41,9%) menjawab cukup baik, dan tidak ada satu pun yang menjawab Tidak baik.

Untuk item pertanyaan kedua mengenai pengalaman kerja para petugas UED-SP sebanyak 11 responden (35,5%) menjawab baik, 19 responden (61,3%) menjawab cukup baik, dan 1 responden (3,2%) menjawab tidak baik.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa sub indikator kompetensi petugas UED-SP mendapatkan rata-rata 14 responden (45,2%) menjawab baik,

mendapatkan rata-rata jawaban cukup baik 16 responden (51,6%), dan menjawab kurang baik mendapatkan rata-rata 1 responden (3,2%). Persentase 51,6% terletak pada interval 34%-66% sehingga tergolong **“Cukup Baik”**. Ini dibuktikan dengan hasil kuesioner penullis pada tanggapan responden terhadap kompetensi petugas ued-sp

Berdasarkan hasil wawancara dengan Evi siswati selaku Komisaris Bumdes di Desa Tenganau terkait Pendidikan dan pengalaman petugas UED-SP diperoleh informasi sebagai berikut:

“Kalau masalah Pendidikan saya rasa tidak berpengaruh terhadap kompetensinya, karena memang mereka disana banyak yang Sarjana yang lulusan SMA ada juga, dalam hal ini bukan berarti mereka yang Pendidikannya tinggi kerjanya lebih bagus dari yang SMA itu tidak, yang penting mereka bisa bekerjasama dengan tim.” (Wawancara Evi Siswati, selaku Komisaris Bumdes , tanggal 5 April 2021).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban Eka Sundari selaku Ketua UED-SP sebagai berikut :

“Disini banyak kok yang sudah Sarjana, jadi saya pikir tidak ada masalah dengan Pendidikan selagi kerjanya jujur dan bisa bekerja sama dengan tim.” (Wawancara Eka Sundari selaku Ketua UED-SP, tanggal 5 April 2021).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban Mery selaku Kepala Tata Usaha UED-SP sebagai berikut :

“karena kebetulan saya juga sarjana jadi ilmu yang saya dapat pada waktu kuliah bisa saya implementasikan waktu kerja ini.” (Wawancara Mery selaku Kepala Tata Usaha UED-SP, tanggal 5 April 2021)

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa memang para petuags UED-SP adalah tamatan Sarjana, staf pembantu juga sarjana dan kepala tata usaha juga tamatan sarjana.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator kompetensi petugas ued-sp, peneliti melihat bahwa petugas ued belum didukung oleh petugas yang kompeten, karena masih banyaknya masyarakat yang kesulitan dalam memahami SOP program ued-sp sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas informasi dalam mengedukasi masyarakat.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuesioner, hasil wawancara dengan Komisariss Bumdes, Ketua Ued-sp, Kepala Tata Usaha, dan hasil observasi dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator kompetensi petugas dalam penelitian Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis berada pada kategori “Cukup Baik” dengan jumlah persentase 51,6%

b. Dukungan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan program UED-SP dikarenakan setiap kebijakan, program dan sasaran yang dituju adalah peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Dukungan partisipasi masyarakat berkaitan dengan adanya UED-SP Desa Tenganau dan juga tanggapan masyarakat desa lain terhadap adanya UED-SP.

Berdasarkan hasil jawaban kuesioner terhadap partisipasi masyarakat menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel V.9 : Distribusi Tanggapan Responden Terkait Indikator Dukungan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

No	Item Pertanyaan	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	Jumlah
1.	Dukungan masyarakat terhadap adanya UED-SP	15 (48,4%)	16 (51,6%)	0 (0,0%)	31 (100%)
2.	Tanggapan masyarakat desa lain terhadap adanya UED-SP Desa Tenganau	14 (45,2%)	15 (48,4%)	2 (6,4%)	31 (100%)
Rata-rata		14	16	1	31
Persentase		(45,2%)	(51,6%)	(3,2%)	(100%)
Kategori		Cukup Baik			

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden berjumlah 31 orang, kemudian untuk item pertanyaan pertama mengenai dukungan masyarakat terhadap adanya UED-SP sebanyak 15 responden (48,4%) menjawab baik, sebanyak 16 responden (51,6%) menjawab cukup baik, dan tidak satu pun menjawab tidak baik.

Untuk item pertanyaan kedua mengenai tanggapan masyarakat desa lain terhadap adanya UED-SP Desa Tenganau sebanyak 14 responden (45,2%) menjawab baik, 15 responden (48,4%) menjawab cukup baik, dan sebanyak 2 (6,4%) orang menjawab tidak baik.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa sub indikator partisipasi masyarakat mendapatkan rata-rata baik dengan jumlah 14 responden (45,2%), mendapatkan rata-rata cukup baik 16 responden (51,6%), dan mendapatkan rata-rata kurang baik 1 responden (3,2%). Persentase 51,6% terletak pada interval 34%-66% sehingga tergolong **“Cukup Baik”**. Ini dibuktikan dengan hasil kuesioner penullis pada tanggapan responden terhadap partisipasi masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Evi Siswati selaku Komisaris Bumdes Desa Tenganau terkait minat dan antusiasme masyarakat terkait adanya program usaha ekonomi desa simpan pinjam diperoleh informasi sebagai berikut:

“Untuk antusiasme luar biasa, dulu pernah waktu saya belum menjabat sempat vakum UED ini, banyak nasabah lari meminjam ke Bank, Setelah say menjabat kita mulai dari awal banyak yang kemarin meminjam ke Bank lari ke kita”. (Wawancara Evi Siswati selaku Komisaris Bumdes tanggal,5 April 2021).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban Eka Sundari selaku Ketua UED-SP sebagai berikut:

“Iya memang antusis, tetapi masih banyak yang lebih suka di Bank meminjam uang dengan alsan disini maksimal 60 juta saja.” (Wawanacara Eka Sundari selaku Ketua UED-SP,tanggal 5 April 2021)

Sejalan dengan hasil hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban Mery selaku Kepala Tata Usaha UED-SP sebagai berikut:

“Tidak semua masyarakat jadi nasabah, saya heran masih banyak gadaikan BPKB kendaraan ke lesing seperti Adira gitu padahal kalau disini prosesnya sama malah jauh lebih cepat, mungkin karena sekampung jadi takut ketahuan warga lain.” (Wawancara Mery selaku Kepala Tata Usaha UED-SP, tanggal 5 April 2021)

Menarik Kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dukungan partisipasi masyarakat tidak begitu optimal, meskipun di tahun 2019 terdapat 12 kali perguliran dana. Dari hasil observasi diketahui bahwa jumlah masyarakat sebanyak 3.345 jiwa dapat diasumsikan masih banyak masyarakat yang lebih mengandalkan Bank dibandingkan UED-SP.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator partisipasi masyarakat, peneliti melihat belum sepenuhnya mendapatkan dukungan dari masyarakat karena peneliti melihat masih banyak yang bergantung pada Bank dan Koperasi. padahal pada dasarnya tujuannya program ini adalah untuk membantu ekonomi masyarakat desa.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuesioner, hasil wawacara dengan Komisaris Bumdes, Ketua Ued-sp, Kepala Tata Usaha, dan berdasarkan observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator partisipasi masyarakat dalam penelitian Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis berada pada kategori **“Cukup Baik”** dengan jumlah persentase 51,6%

4. Rekapitulasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disusun rekapitulasi sebagai berikut :

Tabel V.10 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Penelitian Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

No	Indikator	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	Jumlah
1.	Penyadaran dan Pembentukan Prilaku	12 (38,7%)	18 (58,1%)	1 (3,2%)	31 (100%)
2.	Transpormasi Kemampuan	12 (38,7%)	15 (48,4%)	4 (12,9%)	31 (100%)
3.	Tingkat Kemampuan	14 (45,2%)	16 (51,6%)	1 (3,2%)	31 (100%)
Total		38	49	6	
Rata-rata		13	16	2	31
Persentase		(42%)	(51,6%)	6,4%)	100%
Kategori		Cukup Baik			

Sumber : Data Olahan 2021

Dari data tabel rekapitulasi tanggapan responden terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis untuk kategori penilaian

dari total keseluruhan responden sebanyak 31 orang responden dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penelitian ini dikategorikan “Cukup Baik” dengan total rata-rata 16 (51,6%), sesuai dengan penjelasan di BAB II tentang persentase 34%-66% masuk dalam ketgori “**Cukup Baik**” artinya belum semua indikator terlaksana dengan Baik.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) penulis dilapangan terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis secara keseluruhan sudah cukup baik. Pada indikator Penyadaran Dan Pembentukan Prilaku. Petugas UED-SP sudah melakukan sosialisasi terhadap kejelasan pemberian informasi tentang jenis usaha penggunaan dana dan edukasi yang diberikan petugas terkait segala proses dan prosedur pendanaan, akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak memahami informasi tentang tujuan dari program UED-SP. Artinya Petugas UED-SP belum optimal dalam memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat.

Kemudian pada indikator kedua Transformasi Kemampuan masih tergolong cukup baik, salah satunya disebabkan pertanggungjawaban pembayaran angsuran masyarakat yang masih rendah dibuktikan dengan hasil observasi terkait pemanfaat, diketahui bahwa dari total 157 orang pemanfaat, hanya 60 pemanfaat yang membayar lancar sedangkan pemanfaat yang menunggak 97 orang.

Kemudian pada indikator Tingkat Kemampuan peneliti melihat bahwa berdasarkan pendidikan dasarnya belum optimal akrena petugas ued-sp tidak semuanya sarjana dan tidak ada satupun yang sarjana ekonomi. dan untuk

dukungan masyarakat terhadap program ued-sp ini belum sepenuhnya mendapatkan dukungan dari masyarakat karena peneliti melihat masih banyak yang bergantung pada Bank dan Koperasi.padahal pada dasarnya tujuannya program ini adalah untuk membantu ekonomi masyarakat desa.

C. Hambatan-Hambatan dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan hasil wawancara Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis maka diketahui beberapa hambatan sebagai berikut:

1. Kurangnya Ketegasan Dalam Penerapan Sanksi Bagi Penunggak

Kurangnya ketegasan dalam penerapan sanksi bagi penunggak menjadi salah satu faktor penghambat Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP). Dari jumlah pemanfaat 157 orang pemanfaat yang membayar lancar 60 orang dan 97 orang pemanfaat yang menunggak. Hal ini disebabkan karena pihak UED-SP ingin menjaga hubungan kekeluargaan yang harmonis dengan masyarakat Desa.

Berdasarkan dokumentasi Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 71 tahun 2017 tentang Pedoman Penyertaan Modal Desa ke Badan Usaha Milik Desa yang berasal dari Dana Usaha Ekonomi Desa. Pada point E terkait

penanganan tunggakan, bagi pemanfaat yang menunggak dapat diberikan pembinaan dan sanksi antara lain :

- a. Kunjungan lapangan
- b. Pemberian pelatihan usaha terhadap pemanfaat oleh pemerintah desa
- c. Bagi pemanfaat yang menunggak berdasarkan penilain SAK buka disebabkan oleh faktor karakter dapat diberikan keringanan berupa pembayaran cicilan sesuai kemampuan yang disepakati bersama pengelola unit usaha ekonomi desa simpan pinjam
- d. Sanksi berupa penyampain surat teguran dan suart peringatan dari Kepala Desa
- e. Penjualan angunan, sedapat mungkin dilaksanakan setelah dilakukan musyawarah bersama pemanfaat yang menunggak, yang mekanismenya disepakati dalam rapat pengurus Bumdesa dan dicantumkan
- f. Bumdesa dapat melakukan pembinaan dan memberikan sanksi lain sesuai kesepakatan dalam rapat pengurus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Evi Siswati selaku Komisaris Bumdes terkait hambatan kurangnya ketegasan dalam penerapan sanksi bagi penunggak pada program UED-SP diperoleh informasi sebagai berikut:

“Memang di Perbub itu ada dibahas 6 poin penanganan tunggakan, cumin kita balikkan lagi ke kondisi dilapangan sedapat mungkin itu agak susah, apalagi namanya orang des aini susah untuk ditegasin, tetangga juga, ada hubungan keluarga kadan iya juga. Untuk penanganan sanksi

ini memang sampai sekarang belum ada aturan pastinya karna harus ada dimusyawarahkan jadi toleransi dan kebijakannya itu beda-beda harus dilihat dari jumlah tunggakan dia juga.” (Wawancara tanggal 5 April 2021)

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban Eka Sundari selaku Ketua UED-SP Desa Tengganau diperoleh informasi sebagai berikut:

“Sanksi itu mungkin kurang tepat kalau disebut sanksi untuk penunggak, lebih tepatnya keringanan dan bantuan, memang ketegasan ini kita utamakan untuk yang tunggakanya besar. Nah biasanya kami kunjungi secara silaturahmi istilahnya, kami tanyakan ke si penunggak ini gimanakelanjutnya, apa bagusnya.” (Wawancara 5 April 2021)

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas maka dapat diketahui hambatan pertama adalah rendahnya ketegasan dan sanksi penanganan tunggakan. Meskipun sudah ada Perbub yang mengatur terkait hal ini, namun belum bisa dilaksanakan sepenuhnya mengingat hubungan pihak UED-SP dengan masyarakat. Sanksi tersebut dengan memberikan keringan pembayaran dengan cara menerima berapapun besar cicilan yang dibayarkan masyarakat meskipun jumlahnya tidak penuh.

2. Minimnya Pembinaan, Pendampingan dan Pengawasan dari Kecamatan

Pada dasarnya berdasarkan dokumentasi Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyertaan Modal Desa Ke Badan

Usaha Milik Desa Yang Bersal Dari Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam terkait pembinaan, pendampingan dan pengawasan pasal 10 ayat 2 menyebutkan bahwa kecamatan melaukan pembinaan dan pengawasan dalam wilayah kerjanya:

- a. Memfasilitasi penyertaan modal desa ke Bumdesa yang berasal dari asset Desa dana UED
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Bumdesa
- c. Memfasilitasi penanganan permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Bumdesa
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan Bumdesa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Eka Sundari selaku Ketua UED-SP terkait hambatan minimnya pembinaan, pendampingan dan pengawasan dari Kecamatan pada program UED-SP diperoleh informasi sebagai berikut:

“Jarang, bahkan saya arasa tidak ada pendampingan dan pengawsan dari Kecamatan, setiap arapat tahunan anngaran saja setiap kmai undang mereka jarang datang. Padahal kami masih sangat membutuhkan pembinaan disini (Wawancara, tanggal 5 April 2021)

Sejalaan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban Evi Siswati selaku Komisariss Bumdes diperoleh informasi sebagai berikut :

“Harusnya ada pembinaan dari kecamatan, mulai dari manajemen keuangannya, pengembangan UED-SP itu sendiri dari pelaporan keungan cuman belum optimal.” (Wawancara, 5 April 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa salah satu hamabatn Pemberdayaan Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis ialah

minimnya pembinaan, pendampingan dan pengawasan dari Kecamatan Pinggir, seharusnya pihak Kecamatan melakukan pendampingan sesuai Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 71 Tahun 2017 Pasal 13 Ayat 1 yaitu melakukan pembinaan antara lain dalam hal pembinaan manajemen, studi kelayakan rencana, pengembangan unit usaha dan melaksanakan tugas-tugas pendampingan desa lainnya terkait pengelolaan Bumdesa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Di Desa Tenggau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Indikator Penyadaran dan Pembentukan Prilaku pada kategori cukup baik. Hal ini dikarenakan pertama kejelasan informasi tentang setiap jenis usaha penggunaan dana belum difahami oleh masyarakat pemanfaat program ued-sp, dan yang kedua edukasi yang diberikan petugas ued-sp terkait segala proses dan prosedur pendanaan dari program ued-sp juga belum jelas sehingga masyarakat tidak memahami terkait SOP pinjaman dana dari program UED-SP
2. Indikator Transpormasi Kemampuan pada kategori cukup baik. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pemanfaat yang memunggak dari 157 orang pemanfaat dana hanya 60 orang yang membayar lancar dan selebihnya 97 orang menunggak, hal ini disebabkan karena pihak pengelola ued-sp tidak tegas dalam memberikan sanksi kepada pemanfaat yang menunggak
3. Indikator Tingkat Kemampuan pada ketegori cukup baik, hal ini dikarenakan pendididkan petugas ued-sp tidak semuanya sarjana dan tidak ada satupun yang sarjana ekonomi. dan untuk dukungan

masyarakat terhadap program ued-sp ini belum sepenuhnya mendapatkan dukungan dari masyarakat karena peneliti melihat masih banyak yang bergantung pada Bank dan Koperasi, padahal pada dasarnya tujuannya program ini adalah untuk membantu ekonomi masyarakat desa.

Dengan demikian bahwa Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam Di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis tergolong Cukup Baik. Dikarenakan masih banyaknya pemanfaat yang menunggak, masih kurangnya edukasi dari petugas ued-sp mengenai tujuan dari program ued-sp ini ialah untuk memberdayakan masyarakat.

B. Saran

Adapun saran penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Komisariss Bumdes disarankan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait kemudahan program UED-SP dalam memberikan pinjaman dana kepada masyarakat desa, dengan cara mengundang para tokoh masyarakat, seluruh ketua RT, ketua RW, dan kepala dusun terkait kemudahan dan kelebihan Bumdes dibandingkan dengan Bank.
2. Untuk Ketua UED-SP disarankan untuk mensosialisasikan Peraturan Bupati Bengkalis No 71 tahun 2017 terkait sanksi bagi penunggak kepada masyarakat yang akan meminjam dana sehingga penegakan peraturan menjadi optimal serta tegas untuk menjaga kelangsungan operasional demi meningkatkan ekonomi desa.

3. Untuk Masyarakat Desa Tenggau untuk mulai percaya dan lebih mengutamakan Bumdes dibandingkan Bank.karena masih banyak kemudahan,keuntungan. Masyarakat pemanfaat juga disarankan untuk lebih bijak dalam menggunakan program dana pinjaman untuk keperluan peningkatan ekonomi dibandingkan kebutuhan yang sifatnya konsumtif



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-Buku:

- Anggara, Sahya 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Pustaka Setia
- Ambar Teguh Sulisyanti, 2017. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media
- Agustino, L. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Adi, Isbandi Rukminto, 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Rajawali
- Basyruddin Usman 2002. *Media Pendidikan*. Jakarta: Ciputat Press, Buchari
- Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1984.
- Dessler, Gary. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jilid 1 Edisi 10, Alih Bahasa : Paramita Rahay, (2016), Indeks, Jakarta.
- Eddy Wibowo 2005, *Seni Membangun Kepemimpinan Publik*. Yogyakarta. BPFE
- Hasibuan, M. S. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi Ketujuh Belas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Penyusun, T 2013. *Buku Pedoman Penulisan Badan Penerbit Fisipol*, Pekanbaru : UIr
- Siagian, Sondang P. 2004. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono (2017). *Metode Kuantitatif, Metode Kualitatif, dan R&B*. Bandung : Alfabeta.CV
- Winardi, J. 2004. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Bandung : Kencana

Zulkifli. (2005). *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.

Zulkifli. (2009). *Fungsi- Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.

Zulkifli, & Yogia, M. A. (2014). *Fungsi- Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Zulkifli dan Nurmasari, 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh

Dokumen

Undang- Undang Republik Indonesia, nomor 6 tahun 2014 tentang: *Desa*.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO.6 TAHUN 1998 : Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UED-SP)

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2011, tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa